



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam usaha memahami makna konseptual secara utuh dari pendidikan inklusi dan kearifan lokal, pada bagian ini dipaparkan secara teoretis dari konsep pendidikan inklusi berbasis kearifan lokal di madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar.

A. Pengertian Desain Pendidikan Inklusi

Desain bermakna adanya keseluruhan, struktur, kerangka atau *outline*, dan urutan atau sistematika kegiatan.¹ Selain itu, kata desain juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang sistematika yang dilakukan sebelum tindakan pengembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan². Sementara itu, desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang.³ Desain pembelajaran juga diartikan sebagai proses merumuskan tujuan, strategi, teknik, dan media. Di sisi lain Gagne dkk mengembangkan konsep desain pembelajaran dengan menyatakan bahwa desain pembelajaran membantu proses belajar seseorang yang proses itu sendiri memiliki tahapan segera dan jangka panjang. Menurut mereka, proses belajar terjadi karena adanya kondisi-kondisi belajar internal maupun eksternal.

Kondisi internal adalah kemampuan dan kesiapan diri pembelajar, sedangkan kondisi eksternal adalah pengaturan lingkungan yang didesain. Penyiapan kondisi eksternal belajar inilah yang disebut dengan desain pembelajaran. Untuk itu desain pembelajaran haruslah sistematis dan menerapkan konsep pendekatan sistem agar berhasil

¹ Departemen Pendidikan Khusus and Universitas Pendidikan Indonesia, "Desain Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Kelas Inklusif," *Jassi Anakku* 17, No. 1 (2016): 47–55.

² Enda Puspita, "Menyusun Perencanaan Pembelajaran AUD Enda Puspitasari," *Menyusun Perencanaan Pembelajaran Anak Usia Dini* 01, No. 1 (2012): 67–76.

³ Khusus and Indonesia, "Desain Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Kelas Inklusif."



meningkatkan mutu kinerja seseorang. Mereka juga berpendapat bahwa proses belajar yang terjadi secara internal dapat ditumbuhkan, dandiperkaya jika faktor eksternal pembelajaran dapat didesain dengan efektif.

Desain pembelajaran tidak hanya berperan sebagai pendekatan yang terorganisasi untuk memproduksi dan mengembangkan bahan ajar, tetapi juga merupakan sebuah proses genetik yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah pembelajaran dan kinerja manusia serta menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Menurut Brigg, desain dimulai dari kegiatan analisis yang digunakan untuk menggambarkan masalah pembelajaran sesungguhnya, yang perlu dicari solusinya.⁴ Setelah dapat menentukan masalah yang sesungguhnya maka langkah selanjutnya adalah menentukan alternaif solusi yang akan digunakan untuk mengatasi masalah pembelajaran.

Seorang guru sebagai perancang kegiatan intruksional program pembelajaran perlu menentukan solusi yang tepat dari berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya, ia dapat menerapkan solusi tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Evaluasi adalah langkah selanjutnya sehingga nantinya bisa mengetahui rancangan atau desain yang sesuai dengan pembelajaran dan desain tersebut bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Secara garis besar desain pembelajaran menurut Brigg terdiri beberapa langkah penting, berikut ini.⁵

1. Tujuan
2. Perincian tujuan
3. Rumusan tujuan
4. Analisis tujuan
5. Penyiapan evaluasi hasil belajar
6. Skuen jenjang belajar
7. Penentuan kegiatan belajar
8. Monitoring kegiatan
9. Uji Coba revisi (formatif atau sumatif)

⁴ Ina Agustin, "Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Summersari 1 Kota Malang," *Education and Human Development Journal* 1, No. 1 (2017), <https://doi.org/10.33086/ehdj.v1i1.290>.

⁵ Enda Puspita, "Menyusun Perencanaan Pembelajaran AUD Enda Puspitasari."

Tujuan dari pembelajaran dalam sebuah lembaga pendidikan dan analisis lingkungan dan kebutuhan belajar siswa adalah merancang spesifikasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan belajar siswa, mengembangkan bahan-bahan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Implementasi desain pembelajaran, implementasi evaluasi formatif dan sumatif terhadap program pembelajaran komponen desain pembelajaran. Esensi desain pembelajaran hanyalah mencakup empat komponen, yaitu peserta didik, tujuan, metode dan evaluasi. *Pertama*, peserta didik dalam menentukan desain pembelajaran dan mata pelajaran yang akan disampaikan, perlu diketahui bahwa yang sebenarnya dilakukan oleh para desainer adalah menciptakan situasi belajar yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan peserta didik merasa nyaman dan termotivasi dalam proses belajarnya.

Peserta didik sebelum dan selama belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik fisik maupun mental, misalnya kelelahan, mengantuk, bosan, dan jenuh. Hal ini akan mengurangi konsentrasi peserta didik dan sudah tentu akan terjadi reduksi dalam penyerapan materi yang juga memengaruhi daya tangkap untuk memahami materi. Hal-hal lain yang dapat memengaruhi mutu belajar peserta didik adalah tampilan materi ajar dan gaya penyampaian guru dalam menyampaikan materi.

Kedua, tujuan setiap rumusan tujuan pembelajaran selalu dikembangkan berdasarkan kompetensi atau kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik jika ia selesai belajar. Seandainya tujuan pembelajaran atau kompetensi dinilai sebagai sesuatu yang rumit, tujuan pembelajaran tersebut dirinci menjadi subkompetensi yang mudah dicapai. Di lain pihak, desain pembelajaran memadukan kebutuhan peserta didik dengan kompetensi yang harus dikuasai dengan persyaratan tertentu dalam kondisi yang sudah ditetapkan.

Ketiga, metode yang terkait dengan strategi pembelajaran yang sebaiknya dirancang agar proses belajar berjalan mulus. Metode adalah cara-cara atau teknik yang dianggap jitu untuk menyampaikan materi



ajar.⁶ Dalam desain pembelajaran langkah ini sangat penting karena metode inilah yang menentukan situasi belajar yang sesungguhnya. Di lain pihak kepaiwaan seorang desainer pembelajaran juga terlihat dalam cara menentukan metode. Pada konsep ini metode adalah komponen strategi pembelajaran yang sederhana.

Keempat, evaluasi konsep ini menganggap menilai hasil belajar peserta didik sangat penting. Indikator keberhasilan pencapaian suatu tujuan belajar dapat diamati dari penilaian hasil belajar. Penilaian seringkali dilakukan dengan cara menjawab soal-soal objektif⁷. Penilaian juga dapat dilakukan dengan format nonsoal, yaitu dengan instrumen pengamatan, wawancara, kuesioner, dan sebagainya. Sifat desain pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Desain pembelajaran memang mengacu pada peserta didik. Setiap individu peserta didik dipertimbangkan memiliki kekhasan masing-masing. Menurut Smaldino,⁸ setiap peserta didik memiliki perbedaan karena karakteristik umum, sifat internal yang memengaruhi penyampaian materi seperti kemampuan membaca, jenjang pendidikan, usia, atau latar belakang sosial. Kemampuan awal atau prasyarat merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta didik sebelum peserta didik mempelajari kemampuan baru.

Kemampuan awal yang kurang, sebenarnya menjadi mata rantai penguasaan materi dan menjadi penghambat bagi proses belajar. Selain itu, Gaya belajar, juga berpengaruh. Gaya belajar merupakan berbagai aspek psikologis yang memengaruhi dan berdampak pada penguasaan kemampuan atau kompetensi. Cara mempersepsikan sesuatu hal, motivasi, kepercayaan diri, tipe belajar verbal, visual, kombinasi dan sebagainya. Alur berpikir sistemik

Konsep sistem dan pendekatan sistem diterapkan secara optimal dalam desain pembelajaran sebagai kerangka berpikir. Sistem

⁶ A Aly, "Studi Deskriptif Tentang Nilai-Nilai Multikultural dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam," *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 2015, 9–24, <http://jurnalilmiah.assalaam.or.id/id/wp-content/uploads/2015/02/2-STUDI-DESKRIPTIF-TENTANG-NILAI-NILAI-MULTIKULTURAL-DALAM-PENDIDIKAN.pdf>.

⁷ Lilik Maftuhatin et al., "Evaluasi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) di Kelas Inklusif di SD Plus Darul 'Ulum Jombang," *Jurnal Studi Islam Oktober* 5, No. 2 (2014): 1978–306.

⁸ Khusus and Indonesia, "Desain Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Kelas Inklusif."

sebagai rangkaian komponen dengan masing-masing fungsi yang berbeda, bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan suatu tujuan yang telah dirumuskan. Rumusan ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar jika diuraikan terjadi seperti sebagai suatu sistem. Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya dapat disebabkan oleh salah satu komponen saja. Jadi jika ada perbaikan maka seluruh komponen harus ditinjau kembali. Faktor lain yang berpengaruh adalah empiris dan berulang setiap model desain pembelajaran bersifat empiris.⁹ Model apapun yang diajukan oleh pakar telah melalui kajian teori dan serangkaian uji coba yang mereka lakukan sendiri sebelum dipublikasikan. Pada pelaksanaannya pengguna dapat menerapkan dan memperbaiki setiap tahap berulang kali sesuai dengan masukan demi untuk efektifitas pembelajaran.

Sampai saat ini dukungan terhadap pendidikan inklusi semakin berkembang, namun demikian, pemahaman maupun pandangan terhadapnya masih relatif banyak perbedaan atau bahkan silang pendapat. Hal ini disebabkan oleh adanya pengertian pendidikan inklusi yang bersifat progresif sehingga mengalami penyempurnaan secara terus menerus sejalan dengan semakin mendalamnya renungan orang terhadap praktik pelaksanaan pendidikan inklusi itu sendiri.¹⁰ Alasan kemudian batasan pengertian tentang pendidikan inklusi ini menjadi penting adalah karena akan mendasari prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendidikan inklusi itu sendiri.

Hal yang sangat nyata, banyak sekali masyarakat mengatakan bahwa pendidikan inklusi ini merupakan versi lain dari pendidikan luar biasa.¹¹ Pendidikan inklusi telah berkembang sebagai suatu gerakan untuk menantang kebijakan dan praktik eksklusi. Lahirnya

⁹ Sandey Tantra Paramitha and Lestari Ema Anggara, "Revitalisasi Pendidikan Jasmani untuk Anak Usia Dini melalui Penerapan Model Bermain Edukatif Berbasis Alam," *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga* 3, no. 1 (2018): 41, <https://doi.org/10.17509/jpjo.v3i1.10612>.

¹⁰ Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan," *Jurnal Fakultas Hukum UII* 23, no. 4 (2016): 652–71.

¹¹ Stella Olivia, pendidikan Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus, CV Andi offset Yogyakarta, 2017, 34 : Abdurrahman Wahid, "Islamku, Islam Anda, Islam Kita : Agama Masyarakat Negara Demokrasi," *The Wahid Institution*, 2006, 412, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.



pendidikan inklusi salah satunya dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan.¹²

Pendidikan inklusi mempunyai pengertian yang beragam. Stainback mengemukakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama.¹³ Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil.¹⁴ Lebih dari itu, sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi.¹⁵

Staub dan Peck mengemukakan, bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya.¹⁷ Sementara itu, Sapon-Shevin menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak

¹² Elkana Catur Hardiansah, "Pengantar Edisi Khusus 55 Tahun Pendidikan Planologi: Pembangunan Kota Inklusif di Era Desentralisasi," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 26, No. 1 (2015): 1–6.

¹³ Sandra M. Gonzales, "Cultivating Familismo: Belonging and Inclusion in One Latina/o Learning Community," *International Journal of Inclusive Education* 0, no. 0 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1602362>. ; J Smith, edt Moh Sugiarmim Mif Baihaqi, Sekolah untuk semua, teori dan implementasi inklusi. Nuansa Cendekia, 56; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

¹⁴ Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan."

¹⁵ Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Tunagrahita; Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), H. 1-3

¹⁶ Marilyn Friend and William D Bursuck, (2015) Menuju Pendidikan Inklusi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 33 ; Taruri Deti Aniska, "Layanan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo," *Hanata Widya* 5, No. 5 (2016).

¹⁷ Rina Raudhotul Jannah dan Dr. Sukiman, 2018, Metode Bermain Peran Inklusif Gender pada Anak Usia Dini, Gava Media Jogjakarta.. 43

berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, yaitu di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.¹⁸

Oleh karena itu, ditekankan adanya restrukturisasi sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak. Artinya, sekolah kaya dalam sumber belajar dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya.¹⁹ Melalui pendidikan inklusi, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.²⁰ Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan (berkelainan) yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas.²¹

Sekolah inklusi adalah sekolah yang mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lain mereka,²² termasuk anak berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi sebagai sarana yang ditujukan untuk menanggapi berbagai kebutuhan dari semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya, dan masyarakat, serta mengurangi eksklusifitas atau pengenyampingan dalam dan dari pendidikan. Dengan demikian, diperlukan perubahan dan modifikasi dari isi, pendekatan, struktur, strategi, dengan pandangan wajar yang melindungi semua anak; dan merupakan tanggung jawab dari sistem pendidikan reguler untuk mendidik semua anak. Pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang terlihat.

¹⁸ Dadang garnida, 2015, *Pengantar Pendidikan Inklusi*, Refika Aditama Bandung. 23 ; Siti Hajar And M G Mulyani, "Analisis Kajian Teoritis Perbedaan, Persamaan dan Inklusi dalam Pelayanan Pendidikan Dasar Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Abk)," *Jurnal Mitra Swara Ganesha* 4, No. 2 (2017)

¹⁹ Indah Permata Darma and Binahayati Rusyidi, "Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia [The Implementation of Inclusive Schools in Indonesia]," *Prosiding KS:Riset & PKM* 2, no. 2 (2003): 223–27.

²⁰ Anggoro Wulansari, "Pengaruh Penandaan (Signifikasi), Penguasaan Sumber Daya (Dominasi), Dan Legitimasi Pendidikan Inklusi terhadap Inklusivitas Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Surakarta dalam Perspektif Guru" (Universitas Sebelas Maret, 2016).

²¹ Nissa Tarnoto, "Isi_Artikel_626984286959 - Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif," *Humanitas* 13, no. 1 (2016): 50–61. ;

²² Sofy Ariany Hasan, Muryantinah Mulyo Handayani, and M Psych, "Hubungan Antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Penyesuaian Diri Siswa Tunarungu di Sekolah Inklusi," *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* 3, No. 2 (2014): 128–35.



Inklusi adalah praktik yang mendidik semua siswa, termasuk yang mengalami hambatan yang parah ataupun majemuk, di sekolah-sekolah reguler yang biasanya dimasuki anak-anak nonberkebutuhan khusus.²³ Pendidikan inklusi merupakan praktik yang bertujuan untuk pemenuhan hak asasi manusia atas pendidikan tanpa adanya diskriminasi dengan memberi kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak tanpa perkecualian, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama.²⁴ Dalam keterbatasan pemahaman dan penerimaan akan keberadaan anak berkebutuhan pendidikan khusus, guru membutuhkan pengetahuan dan pengalaman dalam menangani anak berkebutuhan pendidikan khusus.

Latar belakang pendidikan yang tidak memberi bekal tentang anak berkebutuhan khusus menyebabkan hampir semua guru reguler di sekolah dasar menghadapi permasalahan dalam menangani mereka. Selain itu, pengetahuan yang terbatas, dan penerimaan guru juga dapat memengaruhi perlakuan guru terhadap anak berkebutuhan khusus. Penerimaan tersebut juga masih jarang dijumpai sehingga tidak mengherankan bila pandangan negatif masih banyak tertuju. perubahan sistem pendidikan dalam rangka menanggapi keanekaragaman peserta didik. Hal ini memungkinkan baik guru maupun peserta didik merasa nyaman dengan keanekaragaman dan melihatnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar.

B. Penerapan Pendidikan Inklusi

1. Prinsip Dasar Penerapan Pendidikan Inklusi

Prinsip mendasar dari pendidikan inklusi adalah selama memungkinkan, semua anak seyogianya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada

²³ Di Sekolah Dasar, "Pengembangan Media Pembelajaran Sekolah Dasar Islam Yapita Merupakan," n.d., 77–89.

²⁴ Siska Eko Mawarsih et al., "Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri Jumapolo" 1, no. 3 (2013): 1–13.

mereka.²⁵ Definisi tentang pendidikan inklusi yang dilahirkan dari Seminar Agra pada tahun 1998, merumuskan bahwa pendidikan inklusi digambarkan sebagai berikut.

- a. Lebih luas daripada pendidikan formal: mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem nonformal, dan formal.
- b. Mengakui bahwa semua anak dapat belajar.
- c. Memungkinkan struktur, sistem, dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak.
- d. Mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak: usia, gender, etnik, bahasa, kecacatan, status HIV/Aids dan lain-lain.
- e. Merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya.
- f. Merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusi.²⁶

Definisi mutakhir lain dari Ofsted yang dikutip dalam Ainscow, mengatakan bahwa sebuah sekolah yang mempraktikkan pendidikan inklusi merupakan sekolah yang memperhatikan pengajaran dan pembelajaran, pencapaian, sikap dan kesejahteraan setiap anak.²⁷ Selanjutnya dikatakan pula bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang mempraktikkan pendidikan inklusi.²⁸ Definisi tersebut menggambarkan sebuah model pendidikan inklusi yang berdasarkan pada berbagai konsep utama tentang suatu sistem, *stakeholder*, proses, dan sumber daya.

2. Kurikulum Pendidikan Inklusi

Kurikulum akademik Satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusi menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai

²⁵ Muntaz, "Proses Adaptasi Sosial Siswa Disabilitas dengan Siswa Nondisabilitas di Sekolah Inklusi (Studi Kasus pada Siswa Tunanetra di SMP Inklusi Taman Pendidikan dan Asuhan Kabupaten Jember)."

²⁶ Hajar And Mulyani, "Analisis Kajian Teoritis Perbedaan, Persamaan dan Inklusi dalam Pelayanan Pendidikan Dasar Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Abk)."

²⁷ "With Special Educational Needs in Inclusive Schools," n.d., 296–306.

²⁸ Hasan Baharun and Robiatul Awwaliyah, "Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Epistemologi Islam," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 5, no. 1 (2018): 57–71.; Kharisul Wathoni, "Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 1 (2013): 99–109.



dengan kecerdasan, bakat, minat, dan potensinya.²⁹ Kurikulum akomodatif adalah kurikulum standar nasional yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Pengembangan kurikulum akomodatif ini dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi. Sasaran pengembangan kurikulum akomodatif difokuskan pada aspek tujuan, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator, materi, proses maupun evaluasinya. Penerapan kurikulum akomodatif dapat memanfaatkan model penyelarasan kurikulum yang dilakukan dalam bentuk eskalasi, duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi.³⁰

Sedangkan penerapan model kurikulum adaptif ada empat kemungkinan model kurikulum adaptif, yakni.

a. Duplikasi

Duplikasi kurikulum, yakni anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata/reguler. Model kurikulum ini cocok untuk peserta didik tunanetra, tunarungu wicara, tunadaksa, dan tunalaras. Alasannya peserta didik tersebut tidak mengalami hambatan intelegensi. Namun demikian, perlu memodifikasi proses, yakni peserta didik tunanetra menggunakan huruf braille, dan tunarungu wicara menggunakan bahasa isyarat dalam penyampaianannya.

b. Modifikasi

Modifikasi kurikulum, yakni kurikulum siswa rata-rata/reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan/potensi anak berkebutuhan khusus. Modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada peserta didik tunagrahita dan modifikasi kurikulum ke atas (*eskalasi*) untuk peserta didik gifted and talented.

²⁹ Munawir Yusuf, Salim Choiri, and Mahardika Supratiwi, "Evaluation of Inclusive Education Policies at the Level of Primary and Secondary Education in Indonesia (Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia)" 4, No. 2 (n.d.): 147–54.

³⁰ Michael Amponteng et al., "Understanding of Inclusive Education Practices among Parents in Ghana," *Journal of Research in Special Educational Needs* 19, no. 3 (2019): 207–19, <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12443>.

c. Substitusi

Substitusi kurikulum, yakni beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk anak berkebutuhan khusus dengan melihat situasi dan kondisinya.

d. Omisi

Omisi kurikulum, yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total karena tidak memungkinkan bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat berpikir setara dengan anak rata-rata.

Mengembangkan kurikulum untuk siswa berkebutuhan pendidikan khusus pada dasarnya adalah mengawinkan antara model kurikulum dengan komponen kurikulum.³¹ Untuk pelaksanaannya tidak akan lepas dari pengaturan ruang kelas yang dicerminkan pada pengaturan furnitur serta disesuaikan dengan kebutuhan ruang dan mobilitas anak. Berikut adalah beberapa pengaturan tempat duduk yang sesuai dengan kebutuhan anak.

- a. Ruang Kelas A (tunarungu dan tunadaksa)
- b. Ruang Kelas B (tunarungu dan tunanetra)
- c. Ruang Kelas C (tunagrahita dan tunalaras)
- d. Ruang Kelas D (autis dan slow learner)
- e.

Desain universal adalah sebuah pendekatan desain untuk menghasilkan fasilitas dan juga produk bagi semua orang (sebagai pengguna) secara umum, tanpa batasan fisik, rentang usia, dan juga jenis kelamin. Dengan pendekatan desain tersebut, suatu fasilitas maupun produk akan mengalami 'kompromi' sehingga semua orang sebagai pengguna dapat diakomodasi kebutuhannya dalam beraktivitas, tanpa mengeksklusifkan sebagian orang. Kata Universal Design berasal dari

³¹ wulansari, "Pengaruh Penandaan (Signifikasi), Penguasaan Sumber Daya (Dominasi), dan Legitimasi Pendidikan Inklusi terhadap Inklusivitas Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Surakarta dalam Perspektif Guru."



Ronald L. Mace, profesor dari North Carolina.³² Ada beberapa desain yang bisa di gunakan pada penidikan inklusi, yakni sebagai berikut.

a. *Equitabel use* (gunakan adil)

Desain yang dapat digunakan secara wajar oleh semua orang dengan variasi kemampuannya dan tidak menstigmakan penggunaanya

b. *Flexibility in use* (fleksibilitas dalam penggunaan)

Desain yang fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas semua orang (sebagai pengguna) secara umum, tanpa batasan fisik, rentang usia, dan juga jenis kelamin.

c. *Simple and Intuitive use* (penggunaan sederhana dan intuitif)

Desain yang cara penggunaannya mudah dimengerti, tanpa tuntutan pengalaman penggunaan, pengetahuan, dan kemampuan bahasa tertentu.

d. *Perceptible information* (informasi jelas)

Desain yang mengkomunikasikan atau mengakomodasikan informasi dengan efektif kepada pengguna, dan terlepas dari kondisi lingkungan atau kemampuan sensor pengguna.

e. *Tolerance for error* (toleransi untuk kesalahan)

Desain yang meminimalkan dampak dan konsekuensi kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan dari tindakan yang keliru.

f. *Low physical effort* (upaya fisik rendah)

Desain yang dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan usaha kekuatan fisik minimal (tidak melelahkan).

g. *Size and space for approach and use* (ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan)

³² Hajar and Mulyani, "Analisis Kajian Teoritis Perbedaan, Persamaan dan Inklusi dalam Pelayanan Pendidikan Dasar Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Abk)."

E. Konsep Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana parasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu³³ peserta didik. Untuk itu, proses identifikasi dan asesmen yang akurat perlu dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan/atau profesional di bidangnya untuk dapat menyusun program pendidikan yang sesuai dan objektif.

Pendidikan inklusif hanya merupakan salah satu model penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Model yang lain di antaranya adalah sekolah segregasi dan pendidikan terpadu. Perbedaan ketiga model tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Sekolah segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia, bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik, seperti SLB/A (untuk anak tunanetra), SLB/B (untuk anak tunarungu), SLB/C (untuk anak tunagrahita), SLB/D (untuk anak tunadaksa), SLB/E (untuk anak tunalaras) dan lain-lain³⁴.

Satuan pendidikan khusus (SLB) terdiri atas jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB. Sebagai satuan pendidikan khusus, sistem pendidikan yang digunakan terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan

³³ Ane Qvortrup and Lars Qvortrup, "Inclusion: Dimensions of Inclusion in Education," *International Journal of Inclusive Education*, 2018, <https://doi.org/10.1080/13603116.2017.1412506>.

³⁴ Orang Tua, dan Masyarakat, dan Dra Sri Winarsih, "Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping," 2013.



kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Kelemahan dari sekolah segregasi ini antara lain aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas.

Sekolah terpadu adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak³⁵. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem pembelajaran reguler untuk semua peserta didik. Jika ada peserta didik tertentu mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dituntut di sekolah reguler. Dengan kata lain pendidikan terpadu menuntut anak yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan sekolah reguler. Kelemahan dari pendidikan melalui sekolah terpadu ini antara lain, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individual anak. Keuntungannya adalah anak berkebutuhan khusus dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar.

Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya.³⁶ Dengan kata lain pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing.

Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan mulai cara pandang,

³⁵ Sambira Mambela, "Mainstreaming Sebagai Alternatif Penanganan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia" 3, no. 2 (2010): 295-304.

³⁶ Ibid 24

sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi.³⁷ Konsep utama yang terkait dengan pendidikan inklusi adalah konsep-konsep tentang anak di antaranya sebagai berikut.³⁸

1. Semua anak berhak memperoleh pendidikan di dalam sekolah. Semua anak dapat belajar dan siapa pun dapat mengalami kesulitan dalam belajar semua anak membutuhkan dukungan untuk belajar.
2. Pengajaran yang terfokus kepada anak bermanfaat bagi semua anak.
3. Konsep-konsep tentang sistem pendidikan dan persekolahan
4. Pendidikan lebih luas dari persekolahan formal.
5. Sistem pendidikan yang fleksibel dan responsif.
6. Lingkungan pendidikan yang memupuk kemampuan dan ramah.
7. Peningkatan mutu sekolah-sekolah yang efektif.
8. Pendekatan sekolah yang menyeluruh dan kolaborasi antarmitra.

Gagasan bahwa guru perlu mengubah kelas dan lingkungan belajar agar semua anak bisa belajar, menjadi tuntutan di sekolah inklusi. Oleh karena itu, harapan bahwa guru akan melakukan apapun untuk menjamin bahwa setiap siswa akan belajar dengan baik.³⁹ Perubahan praktik mengajar secara efektif menuntut inisiatif dan tanggung jawab tingkat tinggi. Para guru membutuhkan keleluasaan waktu dan energi untuk mengejar pengembangan profesionalitas dan adaptasi praktik secara kontinu. Untuk itu, guru perlu menumbuhkan hal-hal sebagai berikut (1) belajar dari pengalaman secara terus-menerus; (2) melakukan refleksi; (3) melakukan teoretisasi tentang cara yang terbaik untuk menemukan kebutuhan siswa, baik secara individual maupun secara kolektif; (4) belajar melalui kolaborasi dengan kolega secara terus-menerus.⁴⁰

Guru perlu melihat keragaman siswa sebagai tantangan yang dapat mereka hadapi secara sukses. Dengan dukungan, para guru dapat

³⁷ Jia Song, "Inclusive Education in Japan and Korea – Japanese and Korean Teachers' Self-Efficacy and Attitudes Towards Inclusive Education," *Journal of Research in Special Educational Needs* 16 (2016): 643–48, <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12324>.

³⁸ Aini Mahabbati, "Kebijakan, Implementasi dan Isu Strategis Pendidikan Bagi Individu Berkebutuhan Khusus," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, No. 1 (2014): 31–46.

³⁹ Sebagai Solusi dan Eksklusifisme Ajaran, "Pendidikan Inklusif Perspektif QS . Al- Hujurat Ayat 10-13" 3, no. 1 (2018): 54–65.

⁴⁰ James J Lavelle et al., "Customer Injustice and Employee Performance : Roles of Emotional Exhaustion , Surface Acting , and Emotional Demands – Abilities Fit" XX, no. X (2019): 1–29, <https://doi.org/10.1177/0149206319869426.1-6>



berusaha melatih komitmen moral mereka untuk menangani semua siswa sebagai kecakapan untuk menemukan standar prestasi yang tinggi. Pendidikan inklusi secara resmi yang dipahami oleh pemerintah dan banyak dirujuk oleh masyarakat, didefinisikan sebagai berikut. Pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah regular yang terdekat dengan tempat tinggalnya.⁴¹

Penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.⁴² Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa⁴³ menyebutkan, bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.⁴⁴

Aturan terbaru yang mengatur tentang pendidikan inklusi ini, adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan

⁴¹Agus Budiman, "Efektivitas Pembelajaran Agama Islam pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus," *At-Ta'dib* 11, no. 1 (2016). ; Aini Mahabbati, "Pendidikan Yang Inklusif dan Menyenangkan" (Diakses dari [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Aini ...](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Aini...), 2012).

⁴² anggoro Wulansari, "Pengaruh Penandaan (Signifikasi), Penguasaan Sumber Daya (Dominasi), dan Legitimasi Pendidikan Inklusi Terhadap Inklusivitas Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Surakarta dalam Perspektif Guru" (Universitas Sebelas Maret, 2016).

⁴³ Studi, Matematika, and Surakarta, "Pasca Implementasi Program Pendidikan Inklusi."

⁴⁴Jamilah Candra Pratiwi, "Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya," *Prosiding Ilmu Pendidikan* 1, no. 2 (2016).; Wahyuno, Rumiati, And Sutrisno, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar.", 5-8

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.⁴⁵ Hal ini tentunya merupakan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas dengan bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif.⁴⁶

Keberadaan mereka merupakan peluang bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan sumber belajar bagi teman-teman lain untuk mengembangkan sikap-sikap positif. Kebersamaan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler membawa dampak positif bagi anak-anak yang lain, antara lain sebagai berikut.⁴⁷

- a. Kehangatan dan kemampuan menjalin persahabatan;
- b. Mengembangkan pemahaman personal tentang keragaman anak;
- c. Meningkatkan kepedulian kepada anak lain;
- d. Pengembangan kemampuan sosial;
- e. Penurunan kecemasan akan perbedaan manusia yang menimbulkan kenyamanan dan kesadaran.

Oleh karena itu, penanganan anak berkebutuhan pendidikan khusus sejak jenjang sekolah dasar melalui kolaborasi pembelajaran perlu dilakukan. Hal ini tidak saja bermanfaat bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus, tetapi juga bagi anak yang lain juga dapat belajar untuk menghargai keragaman potensi.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Disebutkan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau

⁴⁵ Kamal Fuadi, "Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta," 2011.

⁴⁶ Kate McAnelly and Michael Gaffney, "Rights, Inclusion and Citizenship: A Good News Story about Learning in the Early Years," *International Journal of Inclusive Education* 3116 (2019), <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1629123>.

⁴⁷ Hasan, Handayani, and Psych, "Hubungan Antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Penyesuaian Diri Siswa Tunarungu di Sekolah Inklusi." 3-12



pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.⁴⁸ Sementara itu, dalam pasal 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendidikan inklusi bertujuan sebagai berikut.⁴⁹

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik

Implikasi suksesnya program inklusi adalah adanya guru yang mengakomodasi dan memberi dukungan untuk kebutuhan semua siswa dalam kelas, tidak terlalu banyak paksaan dan tidak mengurangi hak siswa. Sesuai dengan model *bronfenbrenner's ecological* perkembangan anak adalah hasil dari interaksi yang beragam dengan lingkungan dekat mereka, yaitu *microsystem* yang berbeda (seperti keluarga dan sekolah) yang salah satunya dapat memberikan atribusi untuk suksesnya atau kegagalan dari sekolah inklusi. Anak juga dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut.

- a. Interaksi sosial antara dua atau lebih *microsystem* seperti relasi antara keluarganya dan sekolahnya.
- b. Relasi antara satu *microsystem* dan sistem lain, yang tidak termasuk ekosistem seperti hubungan antara sekolahnya dengan dewan pengurus sekolah

⁴⁸ Zumrotul Mukaffa, "Pengembangan Model Madrasah Inklusif (Studi Atas Kesiapan dan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Inklusif Mi Al-Hidayah Margorejo Surabaya)" 12, no. 1 (n.d.).

⁴⁹ Reza Dulisanti, "Penerimaan Sosial dalam Proses Pendidikan Inklusif (Studi Kasus Pada Proses Pendidikan Inklusif di Smk Negeri 2 Malang)," *Indonesian Journal Of Disability Studies (IJDS)* 2, no. 1 (2015).

- c. Masyarakat tempat dia tinggal atau makrosistem yang dipengaruhi oleh budaya, institusi, wilayah dan sebagainya dimana anak tumbuh⁵⁰.

Dari sudut ini, akan menjadi mungkin untuk dianalisis prinsip penting yang berkenaan dengan masa depan anak. Siswa juga dipengaruhi oleh makrosistem dari pemerintah. Ada beberapa yang memegang otoritas dan memegang peranan penting dalam suksesnya implementasi di sekolah inklusi, baik itu dari point manajerial atau point filosofi.⁵¹

F. Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pendidikan inklusi ini dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang Pendidikan bagi Peserta Didik penyandang disabilitas⁵², Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, serta Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003, yakni "Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya empat sekolah yang terdiri dari sekolah dasar, SMP, SMA, SMK".

Walaupun telah ada usaha pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi melalui undang-undang atau peraturan pemerintah, bukan berarti semuanya telah selesai.⁵³ Landasan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan

⁵⁰ Ahmad Fauzi, "Pendidikan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal dalam Praktik Sosial di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur," in *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 2017, 715–25.

⁵¹ (Beaupré et al. Bélanger, Collins & White, Guzmán, Ingram, Parent, Praisner, dalam Schmidt dan Venet 2012, 44

⁵² Admila Rosada dkk, 2014 Refleksi tujuh Pakar Inklusi, Inspirasi dari kelas inklusi, gatudawaca, jakarta, 76

⁵³ Syafrida Elisa, "Sikap Guru terhadap Pendidikan Inklusi Ditinjau dari Faktor Pembentuk Sikap" 2, No. 01 (2013): 1–10.



empiris.⁵⁴ Secara terperinci, landasan-landasan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Landasan filosofis

Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan simbolnya. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)⁵⁵
- b. Pandangan agama (khususnya Islam) antara lain ditegaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (inklusi) dan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ketakwaannya.
- c. Allah pernah menegur Nabi Muhammad saw. karena beliau bermuka masam dan berpaling dari orang buta. Al-Qur'an menceritakan kisah tersebut sebagai berikut.

(1)Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, (2) karena telah datang seorang buta kepadanya, (3) tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), (4) atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?(5) adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, (6) maka kamu melayaninya, (7) padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau Dia tidak membersihkan diri (beriman), (8) dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), (9) sedang ia takut kepada (Allah), (10 maka kamu mengabaikannya, (11) sekali-kali jangan (deMadrasah Ibtidaiyah kian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan, (12) maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya, (13) di dalam Kitab-Kitab yang dimuliakan, (14)yang ditinggikan lagi disucikan, (15) di tangan para penulis (malaikat), (16) yang mulia lagi berbakti.⁵⁶

⁵⁴ Wildan Zulkarnain, "Layanan Khusus Peserta Didik Sebagai Penguat Manajemen Pendidikan," dari Ap. Fip. Um. Ac. Id/Wp-Content/Uploads/.../4-Wildan-Zulkarnain. Pdf, 2016.

⁵⁵ Fitri Rahayu, "Kemampuan Komunikasi Anak Autis dalam Interaksi Sosial (Kasus Anak Autis di Sekolah Inklusi, SD Negeri Giwangan Kotamadya Yogyakarta)," Widia Ortodidaktika 4, No. 1 (2015).

⁵⁶ QS. 'Abasa ayat 1-16. Orang Buta dalam Surat 'Abasa Tersebut Bernama Abdullah Bin Ummi Maktum. Dia Datang Kepada Rasulullah saw Meminta Ajaran-Ajaran tentang Islam; Lalu

- d. Pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan.⁵⁷

2. Landasan Yuridis

Pendidikan inklusi bagi para penyandang ini secara yuridis juga mendapatkan perlindungan secara internasional, yakni dengan adanya Deklarasi Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990), peraturan standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000), dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004).⁵⁸ Secara yuridis, pendidikan inklusi dilaksanakan berdasarkan atas pedoman berikut.⁵⁹

- a. UUD 1945
- b. UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- c. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- g. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusi Menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari sekolah dasar, SMP, SMA, dan SMK.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta

Rasulullah SAW Bermuka Masam dan Berpaling Daripadanya, Karena Beliau Sedang Menghadapi Pembesar Quraisy dengan Pengharapan Agar Pembesar-Pembesar Tersebut Mau Masuk Islam. Maka Turunlah Surat Ini Sebagai Teguran Kepada Rasulullah saw.

⁵⁷ Hasan, Handayani, and Psych, "Hubungan Antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Penyesuaian Diri Siswa Tunarungu di Sekolah Inklusi."

⁵⁸ McAnelly and Gaffney, "Rights, Inclusion and Citizenship: A Good News Story about Learning in the Early Years."

⁵⁹ Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan," Jurnal Fakultas Hukum UII 23, No. 4 (2016): 652-71.



Didik yang memiliki kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

- i. Khusus untuk DKI Jakarta, landasan yuridis yang berlaku, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi⁶⁰

3. Landasan Empiris

Landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusi diuraikan sebagai berikut.⁶¹

- a. Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration of Human Rights*)
- b. Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention of The Rights of Children*)
- c. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990 (*World Conference on Education for All*)
- d. Resolusi PBB nomor 48/96 Tahun 1993 tentang Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan (*the standard rules on the equalization of opportunitites for person with dissabilities*)
- e. Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi 1994 (*Salamanca Statement on Inclusive Education*)
- f. Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua 2000 (*The Dakar ComMadrasah Ibtidaiyah tment on Education for All*)
- g. Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen "*Indonesia Menuju Pendidikan Inklusi*"
- h. Rekomendasi Bukittinggi 2005 mengenai Pendidikan yang Inklusi dan Ramah.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif merupakan sebuah kebijakan yang digunakan dalam melaksanakan program pendidikan inklusif. Latar belakang dibentuknya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Pasal 6 menyatakan sebagai berikut..⁶²

⁶⁰ Fuadi, "Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta."23

⁶¹ Mahabbati, "Kebijakan, Implementasi dan Isu Strategis Pendidikan Bagi Individu berkebutuhan Khusus." 32

⁶² Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan."1-21

- a. Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- b. Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.
- c. Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Supaya program pendidikan inklusif dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan dapat dirasakan oleh semua anak berkebutuhan khusus di Provinsi Jawa Timur, perlu diatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif merupakan kebijakan yang mengatur sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.⁶³

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya ingin memperbaiki kualitas mutu pendidikan dan memberikan pelayanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011, diharapkan mampu melayani semua kepentingan yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus yaitu untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan siswa reguler serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya dan menciptakan pendidikan yang nondiskriminatif dan lebih terperinci lagi di antaranya sebagai berikut.⁶⁴

- a. Memberikan pelayanan kompensatoris dan terapi agar bisa hidup secara mandiri sebagai bekal hidup di tengah masyarakat seperti layaknya mereka yang normal. Dengan demikian, kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 memenuhi

⁶³ Hamidi. 8

⁶⁴ Studi, Matematika, and Surakarta, "Pasca Implementasi Program Pendidikan Inklusi." 6



semua kepentingan yang dibutuhkan target grupnya untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak sesuai dengan hambatan masing-masing dan dapat bersosialisasi, hidup mandiri, serta menciptakan pendidikan yang tidak diskriminasi.

- b. Kedua, tipe manfaat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jawa Timur. Hal tersebut dalam rangka memperluas pemerataan dan akses pendidikan bagi peserta didik usia sekolah, baik laki-laki maupun perempuan yang belum terlayani untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan melalui pendidikan inklusif bagi anak peserta didik yang berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia layanan pendidikan khusus atau luar biasa.

Setelah dibentuknya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, maka manfaat dari kebijakan ini adalah untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam dunia pendidikan dengan tanpa adanya diskriminasi⁶⁵. Diskriminasi yang dimaksudkan antara lain pembedaan atas dasar gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak. Selain itu adanya peraturan ini dapat memberikan manfaat kepada peserta didik berkebutuhan khusus agar bisa hidup secara mandiri dan dapat bersosialisasi dengan peserta didik pada umumnya. Jadi, manfaat yang diterima dari diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat bersosialisasi dengan peserta didik pada umumnya, serta dapat menambah pengetahuan atau wawasan siswa berkebutuhan kebutuhan. Jika anak berkebutuhan khusus tetap dibiarkan sekolah di Luar Biasa atau SLB (Sekolah Segregasi), mereka hanya bersosialisasi dengan

⁶⁵ Rona Fitria, "Proses Pembelajaran dalam Setting Inklusi di Sekolah Dasar," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus* 1, No. 1 (2012): 90-101.3

teman yang mempunyai hambatan yang sama sehingga dari segi pemikiran tidak dapat berkembang⁶⁶.

- c. Ketiga, derajat perubahan yang diinginkan Kebijakan yang termuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebenarnya sama seperti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 hanya menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur. Dengan dibentuknya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011, perubahan yang diharapkan, yaitu mampu untuk memberikan layanan mutu pendidikan yang berkualitas bagi anak berkebutuhan khusus melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif. Alasannya, yaitu sebelum adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 ini layanan yang diberikan anak berkebutuhan khusus sangat terbatas karena terkendalanya tenaga, ilmu serta keterampilan yang dimiliki oleh tenaga pendidik pelaksanaan pendidikan inklusif tidak berjalan efektif.⁶⁷
- d. Keempat, letak pengambilan keputusan penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dilaksanakan pada lembaga pendidikan di semua jenjang sekolah PAUD, TK/SD/SMP/SMA, dan SMK yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan serta juga dapat diselenggarakan oleh kelompok belajar, RA/BA, MI/MTs dan SMA yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dalam hal ini, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif merupakan kebijakan yang dilaksanakan berada di bawah

⁶⁶ J David Smith, "Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua," *Bandung: Nuansa*, 2006.,162

⁶⁷ Pratiwi, "Sekolah Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan terhadap Tantangan Kedepannya."4-7



naungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, pembinaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat daerah/provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, kemudian diturunkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya sebagai pembinaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat kota.

- e. Kelima pelaksanaan program Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 merupakan sebuah kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif supaya program pendidikan inklusif dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Jadi, dibutuhkan implementor dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif. Dalam hal ini, jumlah guru pendidik khusus dari PLB ada 1 orang, kemudian jumlah guru mata pelajaran yang mendapatkan pelatihan ada 75 orang, jumlah tim pengembang inklusi ada 5 orang, jumlah peserta didik berkebutuhan khusus ada 60 siswa dan siswa reguler kurang lebih ada 900 anak terbagi menjadi 28 kelas. Implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan program pendidikan inklusif ini sudah memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
- f. Keenam sumber daya yang dilibatkan. Variabel sumber daya merupakan sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan agar berjalan secara efektif. Sumber daya yang dialokasikan dalam implementasi sebuah kebijakan adalah sumber daya manusia dan non-manusia.

G. Model Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu.⁶⁸ Pada sekolah inklusi setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana-prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya.⁶⁹ Keuntungan dari

⁶⁸ Mukaffa, "Pengembangan Model Madrasah Inklusif (Studi Atas Kesiapan dan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Inklusif Mi Al-Hidayah Margorejo Surabaya)."

⁶⁹ Jamilah Candra Pratiwi, "Sekolah Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya," Prosiding Ilmu Pendidikan 1, No. 2 (2016).

pendidikan inklusi adalah bahwa anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai dengan potensinya masing-masing.⁷⁰

Pendidikan inklusi mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Pandangan mengenai pendidikan yang harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik ini sangat terkait dengan adanya perbedaan yang terdapat dalam diri peserta didik. Pandangan lama yang menyatakan bahwa peserta didiklah yang harus menyesuaikan dengan pendidikan dan proses pembelajaran di kelas lambat laun harus berubah.⁷¹ Istilah inklusi berimplikasi pada adanya kebutuhan yang harus dipenuhi bagi semua anak dalam sekolah. Hal ini menyebabkan adanya penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran.

Penyesuaian pendidikan (*adaptive education*) dilaksanakan dengan menyediakan pengalaman-pengalaman belajar guna membantu masing-masing peserta didik dalam meraih tujuan-tujuan pendidikan yang dikehendakinya.⁷² Penyesuaian pendidikan dapat berlangsung tatkala lingkungan pembelajaran sekolah dimodifikasi untuk merespons perbedaan-perbedaan peserta didik secara efektif dan mengembangkan kemampuan peserta didik agar dapat bertahan dalam lingkungan tersebut.⁷³ Dengan melihat adanya penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda, maka dalam *setting* pendidikan inklusi model pendidikan yang dilaksanakan memiliki model yang berbeda dengan model pendidikan yang lazim dilaksanakan di sekolah-sekolah reguler.⁷⁴ Pendidikan inklusi pada dasarnya memiliki dua model.⁷⁵

⁷⁰ Reza Dulisanti, "Penerimaan Sosial dalam Proses Pendidikan Inklusif (Studi Kasus pada Proses Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang)," *Indonesian Journal of Disability Studies (Ijds)* 2, no. 1 (2015).

⁷¹ Henry Clay Lindgren, *Educational Psychology in The Classroom*, (Tokyo: Charles E. Tuttle Company, 1967), Cet. Ke-III, H. 503-504

⁷² Fitria, "Proses Pembelajaran dalam Setting Inklusi di Sekolah Dasar."23

⁷³ George S. Morrison, *Early Childhood Education Today*, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2009), H. 462.

⁷⁴ Fitria, "Proses Pembelajaran dalam Setting Inklusi di Sekolah Dasar."12

⁷⁵ Smith, "Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua."246



- a. Pertama, yaitu model inklusi penuh (*full inclusion*). Model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler.
- b. Kedua, yaitu model inklusi parsial (*partial inclusion*). Model parsial ini mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas *pull out* dengan bantuan guru pendamping khusus.⁷⁶

Model lain misalnya dikemukakan oleh Brent Hardin dan Marie Hardin. Brent dan Maria mengemukakan model pendidikan inklusi yang mereka sebut inklusi terbalik (*reverse inclusive*). Dalam model ini, peserta didik normal dimasukkan ke dalam kelas yang berisi peserta didik berkebutuhan khusus.⁷⁷ Model ini berkebalikan dengan model yang pada umumnya memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam kelas yang berisi peserta didik normal. Model inklusi terbalik agaknya menjadi model yang kurang lazim dilaksanakan. Model ini mengandaikan peserta didik berkebutuhan khusus sebagai peserta didik dengan jumlah yang lebih banyak dari peserta didik normal.

Dengan pengandaian demikian seolah sekolah untuk anak berkebutuhan khusus secara kuantitas lebih banyak dari sekolah untuk peserta didik normal, atau bisa juga tidak. Model pendidikan inklusi seperti apapun tampaknya tidak menjadi persoalan berarti sepanjang mengacu kepada konsep dasar pendidikan inklusi. Model pendidikan inklusi yang diselenggarakan pemerintah Indonesia yaitu model pendidikan inklusi moderat.⁷⁸ Pendidikan inklusi moderat yang dimaksud, dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Pendidikan inklusi yang memadukan antara terpadu dan inklusi penuh
- 2) Model moderat ini dikenal dengan model *mainstreaming*

Model pendidikan *mainstreaming* merupakan model yang memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus

76j. David Smith, *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006),. 46.

77 Brent Hardin dan Maria Hardin, "Into The Mainstream: Practical Strategies For Teaching in Inclusive Environments", dalam Kathleen M. Cauley (Ed.), *Educational Psychology*, (New York: Mcgraw-Hill/Dushkin, 2004), H. 46-48.

78 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, H. 8-9

(Sekolah Luar Biasa) dengan pendidikan reguler.⁷⁹ Peserta didik berkebutuhan khusus digabungkan ke dalam kelas reguler hanya untuk beberapa waktu saja.⁸⁰ Filosofinya tetap pendidikan inklusi, tetapi dalam praktiknya anak berkebutuhan khusus disediakan berbagai alternatif layanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.⁸¹ Anak berkebutuhan khusus dapat berpindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan yang lain, seperti berikut ini.

- d. Bentuk kelas reguler penuh, yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.
- e. Bentuk kelas reguler dengan *cluster*.
- f. Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus.
- g. Bentuk kelas reguler dengan *pull out* yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler, tetapi dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
- h. Bentuk kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out* yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama dengan guru pembimbing khusus
- i. Bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah reguler, tetapi dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler
- j. Bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.⁸²

⁷⁹ Pratiwi, "Sekolah Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan terhadap Tantangan Kedepannya."5-8

⁸⁰ Jane B. Schulz, *Mainstreaming Exceptional Students; A Guide For Classroom Teachers*, (Boston: Allyn And Bacon, 1991), H. 20-21

⁸¹ McAnelly and Gaffney, "Rights, Inclusion and Citizenship: A Good News Story about Learning in the Early Years."13-16

⁸² Agustyawati dan Solicha, *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), H. 100. Lihat Juga Sip Jan Pijl Dan Cor J.W.Meijer, *Factor In Inclusion: A Framework dalam Sip Jan Pijl (Eds.), Inclusive Education; A Global Agenda*, (London: Routledge, 1997), H. 12.



Dengan demikian, pendidikan inklusi seperti pada model di atas tidak mengharuskan semua anak berkelainan berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajarannya (inklusi penuh). Hal ini dikarenakan sebagian anak berkelainan dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi dengan gradasi kelainannya yang cukup berat.⁸³ Bahkan bagi anak berkelainan yang gradasi kelainannya berat, mungkin akan lebih banyak waktunya berada di kelas khusus pada sekolah reguler (inklusi lokasi). Kemudian, bagi yang gradasi kelainannya sangat berat dan tidak memungkinkan di sekolah reguler (sekolah biasa), dapat disalurkan ke sekolah khusus (SLB) atau tempat khusus (rumah sakit).⁸⁴

C. Evaluasi Pendidikan Inklusi

Dalam sebuah kegiatan selalu harus ada evaluasi sebagai tolok ukur keberhasilannya. Konsep evaluasi yang di kemukakan oleh Malcon Provus yakni evaluasi model kesenjangan (*Decrepancy Model*) bahwa evaluasi adalah seni (*Art*) melukiskan ketimpangan antara standart yang berlaku dengan standar kinerja yang dilaksanakan atau sedang terjadi.⁸⁵Evaluasi yang akan dilakukan meliputi pini-poin sebagai berikut.

1. Desain yang disusun dan melibatkan kebutuhan peserta didik, staf, guru, dan tenaga pendidikan yang ada untuk mewujudkan tujuan yang telah disusun bersama.
2. Instalasi adalah rancangan dalam menjalankan program sebagai standar langkah program yang sudah tersusun.
3. Proses adalah perolehan data tentang sejauh mana keberhasilan program telah dilaksanakan.⁸⁶
4. Produk adalah hasil akhir dari sebuah evaluasi pada tujuan program yang telah dilakukan.

⁸³ Ingrid Lewis et al., "Time to Stop Polishing the Brass on the Titanic: Moving beyond 'Quick-and-Dirty' Teacher Education for Inclusion, towards Sustainable Theories of Change," *International Journal of Inclusive Education* 23, no. 7-8 (2019): 722-39, <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1624847.15>

⁸⁴ Leechin Heng, Kathleen Quinlivan, and Rosemary du Plessis, "Exploring the Creation of a New Initial Teacher Education (ITE) Programme Underpinned by Inclusion," *International Journal of Inclusive Education* 3116 (2019), <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1625454.32>

⁸⁵ Wirawan, 2012. *Evaluasi teori, Model standar aplikasi dan profesi*, Jakarta Raja Grafindo, 106

⁸⁶ Rose Clear & Glen F Nyre 2011, *The Practica, of Evaluation Testig Servise* Princeton, New Jersey Eric/Tm report, 65

5. Analisis biaya dan manfaat dari penggunaan biaya yang telah di anggarkan dengan membandingkan penggunaan biaya dan hasil yang diperoleh.

Karena terdapat perbedaan dalam konsep dan model pendidikan, maka dalam pendidikan inklusi terdapat beberapa komponen pendidikan yang perlu dikelola dalam sekolah inklusi,⁸⁷ yaitu.

1. Manajemen Peserta Didik
2. Manajemen Kurikulum
3. Manajemen Tenaga Kependidikan
4. Manajemen Sarana dan Prasarana
5. Manajemen Keuangan/Dana
6. Manajemen Lingkungan (Hubungan Sekolah dan Masyarakat)

Sedangkan komponen dalam pendidikan inklusi dijelaskan sebagai berikut.

a. Manajemen Peserta didik

Manajemen peserta didik merupakan salah satu komponen pendidikan inklusi yang perlu mendapat perhatian dan pengelolaan lebih. Hal ini dikarenakan oleh kondisi peserta didik pada pendidikan inklusi yang lebih majemuk daripada kondisi peserta didik pada pendidikan reguler⁸⁸. Tujuan dari manajemen peserta didik ini tidak lain agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Pendidikan inklusi masih menggunakan kurikulum standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, kurikulum pada pendidikan inklusi disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik.

Anak berkebutuhan khusus tentu memiliki problema yang berbeda-beda serta penanganannya di antaranya sebagai berikut.

⁸⁷ Zulkarnain, "Layanan Khusus Peserta Didik sebagai Penguat Manajemen Pendidikan"⁴¹

⁸⁸ Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Policy Brief, Sekolah Inklusif; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi, No. 9. Th.II/2008, Departemen Pendidikan Nasional, H. 6-9



- 1) Anak berkebutuhan khusus dengan gangguan kesulitan belajar, gangguan intelektual, dan *slow learner*.⁸⁹ Peran guru dalam membimbing terhadap perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus kesulitan belajar, gangguan intelektual, dan *slow learner* dapat dilihat dari hasil observasi ketika guru meminta peserta didik menulis kalimat "*innamal a'malu binniyyat*" anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan kesulitan belajar, gangguan intelektual, dan *slow learner*. Mereka tidak langsung melakukan hal yang diperintahkan oleh guru malah sibuk dengan dunianya sendiri dan ada juga yang melamun, biasanya guru menghampiri peserta didik anak berkebutuhan khusus tersebut dan mengulang perintahnya olehnya, jika peserta didik berkebutuhan tersebut belum paham juga, guru membantu dengan cara menulis awalan kalimat yang diperintahkan tadi dalam tulisan Arab dan dilanjutkan oleh anak berkebutuhan khusus.
- 2) Anak berkebutuhan khusus dengan gangguan autisme dan gangguan sosial, emosi dan⁹⁰ perilaku. Peran guru dalam membimbing terhadap perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus dengan gangguan autisme dan gangguan sosial, emosi dan perilaku. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, guru menjelaskan pelajaran ada Anak Berkebutuhan khusus yang keluar kelas tanpa izin dari guru dan berperilaku di luar kendali sehingga menyebabkan peserta didik yang lain terganggu. Peran guru di sini guru membimbing dan menenangkan dengan menuntun anak berkebutuhan khusus membaca doa-doa yang pernah dihafalkan peserta didik berkebutuhan tersebut.
- 3) Anak berkebutuhan khusus tunadaksa dan tunarungu. Peran guru sangat vital dalam membimbing terhadap perkembangan kognitif Anak berkebutuhan khusus tunadaksa dan tunarungu. Untuk kelas-kelas rendah atau di sekolah dasar, adanya anak-anak yang termasuk anak berkebutuhan khusus sangat mungkin ditemukan di sana. Namun keberadaan anak ini biasanya belum begitu dikenali oleh guru pengampunya. Hal ini terjadi karena guru belum memiliki wawasan mengenai anak berkebutuhan khusus. Guru di sekolah dasar kebanyakan baru mengetahui mengenai anak tunanetra,

⁸⁹ Orang Tua, dan Masyarakat, and Dra Sri Winarsih, "Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping," 2013. 2-14

⁹⁰ Nandiyah Abdullah, "Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus," no. 86 (2013): 1-10.

tunarungu, dan tunadaksa, autisme saja karena relatif mudah dikenali dan dideteksi. Biasanya yang lain belum begitu banyak dikenali sehingga sangat mungkin memberikan perlakuan yang salah.

Bagi yang telah terbiasa bergelut atau menangani anak berkebutuhan khusus tentu telah banyak memiliki wawasan dan kemampuan mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus.⁹¹ Hal ini, tentu sangat berbeda dengan mereka yang belum terbiasa atau bukan bidangnya sehingga banyak memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami anak berkebutuhan khusus. Untuk mengidentifikasi seorang anak tergolong anak dengan kebutuhan khusus atau bukan, perlu terlebih dahulu dirumuskan pengertian anak kebutuhan khusus, ciri-ciri atau karakteristik, kemudian dirumuskan kaitannya dengan identifikasi anak berkebutuhan khusus ini. Pengertian anak kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental-intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan dan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.⁹²

Dengan demikian, meskipun seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu, tetapi tidak signifikan sehingga mereka tidak memerlukan pelayanan pendidikan khusus, maka anak tersebut tidak termasuk anak kebutuhan khusus.⁹³ Berlaku sebaliknya walaupun kelihatannya mereka secara fisik, mental intelektual, sosial, dan emosional tidak mengalami kelainan, tetapi apabila dalam pendidikannya mereka memerlukan layanan khusus maka anak tersebut dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Untuk memahami lebih lanjut anak berkebutuhan khusus dalam konteks pendidikan, maka pengenalan mengenai anak berkebutuhan khusus sangat diperlukan.

⁹¹ Mambela, "Mainstreaming Sebagai Alternatif Penanganan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia." 23-24

⁹² Abdullah, "Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus." 19-20

⁹³ Lewis et al., "Time to Stop Polishing the Brass on the Titanic: Moving beyond 'Quick-and-Dirty' Teacher Education for Inclusion, towards Sustainable Theories of Change."



Adapun beberapa jenis anak berkebutuhan khusus yang sering kita temui, secara singkat dijelaskan sebagai berikut.⁹⁴

1) Anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak dengan kebutuhan khusus memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Karakteristik atau ciri-ciri yang menonjol dari anak tunanetra adalah sebagai berikut.⁹⁵

- a) Tidak mampu melihat
- b) Tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter
- c) Kerusakan nyata pada kedua bola mata,
- d) Sering meraba-raba/tersandung waktu berjalan,
- e) Mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya,
- f) Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh/besisik/kering,
- g) Peradangan hebat pada kedua bola mata, dan
- h) Mata sering bergoyang.

Karakteristik yang ada ini tentu tidak mesti semuanya muncul. Namun bila sangat mendominasi dan mengganggu proses pendidikannya, maka dikatakan sebagai anak tunanetra sehingga memerlukan pelayanan khusus dalam pendidikannya.

1) Anak tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masih tetap

⁹⁴ Yusuf, Choiri, and Supratiwi, "Evaluation of Inclusive Education Policies at the Level of Primary and Secondary Education in Indonesia (Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia)."1-17

⁹⁵ WULANSARI, "Pengaruh Penandaan (Signifikasi), Penguasaan Sumber Daya (Dominasi), dan Legitimasi Pendidikan Inklusi Terhadap Inklusivitas Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Surakarta dalam Perspektif Guru."34

memerlukan pelayanan pendidikan khusus.⁹⁶ Dalam kelompok tunarungu ini biasanya juga dikenal adanya anak yang mengalami gangguan komunikasi, yaitu anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi atau pengucapan, atau kelancaran bicara, yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa atau fungsi bahasa, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus.⁹⁷ Memang anak yang mengalami gangguan komunikasi tidak selalu disebabkan karena faktor ketunarunguan. Karakteristik anak tunarungu, yaitu.⁹⁸

- a) Tidak mampu mendengar,
- b) Terlambat perkembangan bahasa,
- c) Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi,
- d) Kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara,
- e) Ucapan kata tidak jelas,
- f) Kualitas suara monoton,
- g) Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, dan
- h) Banyak perhatian terhadap getaran

Anak yang mengalami gangguan komunikasi memiliki karakteristik; sulit menangkap isi pembicaraan orang lain, tidak lancar dalam berbicara dan mengemukakan ide, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi kalau berbicara sering gagap atau gugup, suaranya parau tidak fasih mengucapkan kata-kata tertentu seperti celat atau cadel, dan organ bicaranya tidak normal.⁹⁹

- 3) Ketiga, anak tunagrahita atau sering disebut retardasi mental adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan

⁹⁶ Lewis et al., "Time to Stop Polishing the Brass on the Titanic: Moving beyond 'Quick-and-Dirty' Teacher Education for Inclusion, towards Sustainable Theories of Change." 12-19

⁹⁷ Rahayu, "Kemampuan Komunikasi Anak Autis dalam Interaksi Sosial (Kasus Anak Autis Di Sekolah Inklusi, SD Negeri Giwangan Kotamadya Yogyakarta)." 1-5

⁹⁸ Heng, Quinlivan, and du Plessis, "Exploring the Creation of a New Initial Teacher Education (ITE) Programme Underpinned by Inclusion." 1-9

⁹⁹ Muntaz, "Proses Adaptasi Sosial Siswa Disabilitas dengan Siswa Nondisabilitas di Sekolah Inklusi (Studi Kasus pada Siswa Tunanetra Di SMP Inklusi Taman Pendidikan dan Asuhan Kabupaten Jember)." 18



karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus.¹⁰⁰ Tunagrahita dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu mampu didik, mampu latih, dan mampu rawat. Adapun karakteristik anak tunagrahita sebagai berikut.¹⁰¹

- (a) penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil/ besar;
- (b) tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia;
- (c) perkembangan bicara/bahasa terlambat;
- (d) tidak ada/kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan (pandangan kosong);
- (e) koordinasi gerakan kurang (gerakan sering tidak terkendali), dan
- (f) sering keluar ludah dari mulut (ngiler).

Anak tunagrahita terutama yang memiliki tingkat intelegensi antara 55-75 inilah yang sering luput dari perhatian guru di sekolah karena guru tidak menyangka kalau siswanya tersebut termasuk anak tunagrahita sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus.¹⁰²

- 4) Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi, otot) dan syaraf sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak tunadaksa jenisnya sangat banyak dan saat ini yang sering ditemukan adalah anak tunadaksa jenis *cerebral palsy* dan *poliomyelitis*.¹⁰³ Adapun karakteristik anak tunadaksa, yaitu.
 - (a) anggota gerak tubuh kaku/lemah/lumpuh;
 - (b) kesulitan dalam gerakan (tidak sempurna, tidak lentur/tidak terkendali);
 - (c) terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap/tidak sempurna/lebih kecil dari biasa;
 - (d) terdapat cacat pada alat gerak;
 - (e) jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam;

¹⁰⁰ Ibid, 4

¹⁰¹ Sophia Attwood, Jude MacArthur, and Alison Kearney, "Beginner Secondary Teacher Preparedness for Inclusion," *International Journal of Inclusive Education* 3116 (2019), <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1625455.14-16>

¹⁰² Ibid, 17

¹⁰³ Aniska, "Layanan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo." 1-8

- (f) kesulitan pada saat berdiri/berjalan/duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal.

Jenis anak tunadaksa ini mungkin guru sudah mampu mengenali, tetapi sangat mungkin guru belum sampai memahami jenisnya dan cara memberikan pelayanan yang tepat bagi mereka.¹⁰⁴

- 5) Anak tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya.¹⁰⁵ Anak tunalaras secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut.¹⁰⁶
- (a) Bersikap membangkang;
 - (b) Mudah terangsang emosinya/emosional/mudah marah;
 - (c) Sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu;
 - (d) Sering bertindak melanggar norma sosial atau norma susila atau hukum.

Anak tunalaras ini dalam pengkajian selanjutnya sering disebut sebagai anak dengan gangguan emosi dan perilaku.¹⁰⁷ Dikatakan anak dengan gangguan emosi dan perilaku karena lebih menitikberatkan pada faktor penyebab dan kemungkinan tindakan untuk memberikan layanan bagi anak tersebut.

- 6) Anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi, kreativitas tinggi, dan tanggung jawab terhadap tugas atau task commitment di atas anak-anak seusianya atau anak normal sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata,

¹⁰⁴ Ibid , 7

¹⁰⁵ Wahyuno, Rumiati, and Sutrisno, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar.", 42-43

¹⁰⁶ Florentina Tamariska Wijaya et al., "Implementasi Konsep ' Harmony in Equality ' Pada Desain Interior Sekolah Inklusi Galuh Handayani Surabaya" 6, no. 2 (2018): 453-64.

¹⁰⁷ Ibid , 45



diperlukan pelayanan pendidikan khusus¹⁰⁸. Banyak karakteristik yang melekat pada anak berbakat antara lain.

- (a) membaca pada usia lebih muda;
 - (b) membaca lebih cepat dan lebih banyak;
 - (c) memiliki perbendaharaan kata yang luas;
 - (d) mempunyai rasa ingin tahu yang kuat;
 - (e) mempunyai minat yang luas;
 - (f) mempunyai inisiatif dan dapat berkeja sendiri;
 - (g) menunjukkan keaslian (orisinalitas) dalam ungkapan verbal, dapat memberikan banyak gagasan, luwes dalam berpikir, terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan;
 - (h) mempunyai pengamatan yang tajam;
 - (i) dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu panjang, terutama terhadap tugas atau bidang yang diminati;
 - (j) berpikir kritis, juga terhadap diri sendiri, senang mencoba hal-hal baru;
 - (k) mempunyai daya abstraksi, konseptualisasi, dan sintesis yang tinggi;
 - (l) senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan-pemecahan masalah;
 - (m) cepat menangkap hubungan sebab akibat;
 - (n) berperilaku terarah pada tujuan, mempunyai daya imajinasi yang kuat;
 - (o) mempunyai daya ingat yang kuat, tidak cepat puas dengan prestasinya, dan sebagainya.
- 7) Ketujuh, anak lamban belajar atau anak slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita.¹⁰⁹ Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibanding dengan yang tunagrahita, lebih lamban dibanding dengan yang normal. Mereka butuh waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun nonakademik, dan karenanya memerlukan

¹⁰⁸ Muhammad Awwad, "Urgensi Layanan Bimbingan dan Konseling Bagi Anak Berkebutuhan Khusus," *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 4, no. 1 (2015): 46–64.

¹⁰⁹ Budiman, "Efektivitas Pembelajaran Agama Islam pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus." 12-15

pelayanan pendidikan khusus. Anak dengan lamban belajar memiliki karakteristik sebagai berikut.¹¹⁰

- (a) Rata-rata prestasi belajarnya selalu rendah;
- (b) Dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan teman-teman seusianya;
- (c) Daya tangkap terhadap pelajaran lambat.

Anak-anak ini juga sangat mungkin sering luput dari perhatian guru karena secara fisik atau penampilan fisik anak-anak ini tidak menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok dengan anak-anak pada umumnya. Keberadaan anak lamban belajar sesungguhnya termasuk dalam jumlah yang banyak dan sering ditemukan di sekolah terutama di sekolah dasar di kelas rendah yaitu antara kelas satu hingga kelas tiga.¹¹¹

- 8) Anak berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau matematika. Anak berkesulitan belajar spesifik diduga disebabkan karena faktor disfungsi neugologis, bukan disebabkan karena faktor inteligensinya.¹¹² Kebanyakan anak berkesulitan belajar spesifik memiliki inteligensi normal, bahkan ada yang di atas normal tetapi mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Anak berkesulitan belajar spesifik dapat berupa.
 - (a) kesulitan belajar membaca (disleksia), Anak yang mengalami kesulitan membaca (disleksia) maka perkembangan kemampuan membacanya terlambat, kemampuan memahami isi bacaan rendah, dan kalau membaca sering banyak salah.¹¹³
 - (b) kesulitan belajar menulis (disgrafia), Anak yang mengalami kesulitan belajar menulis (disgrafia), yaitu kalau menyalin tulisan

¹¹⁰ Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 2

¹¹¹ Berkebutuhan Khusus, A B K Di, and Provinsi Jawa, "Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Penelitian Pendidikan A & A (Semarang)* 32, no. 2 (2015): 119–26, <https://doi.org/10.15294/jpp.v32i2.5057>.

¹¹² Fibriana Anjaryati, "Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Beyond Centers And Circle Times (BCCT) Di PAUD Inklusi Ahsanu Amala Yogyakarta," 2011, 1–179.

¹¹³ S.P Hermanto, "Kemampuan Guru dalam Melakukan Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi," *Dinamika Pendidikan UNY* 15, no. 1 (2010): 4–7.



sering terlambat selesai, sering salah menulis huruf b dengan p, p dengan q, v dengan u, 2 dengan 5, 6 dengan 9, dan sebagainya. Hasil tulisannya jelek dan tidak terbaca, tulisannya banyak salah/terbalik/huruf hilang, sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris.¹¹⁴

- (c) kesulitan belajar berhitung (diskalkulia), adapun anak yang mengalami kesulitan belajar berhitung (diskalkulia) adalah mereka yang sulit membedakan tanda-tanda: +, -, x, :, >, <, =, sulit mengoperasikan hitungan/bilangan, sering salah membilang dengan urut, sering salah membedakan angka 9 dengan 6; 17 dengan 71, 2 dengan 5, 3 dengan 8, dan sebagainya, dan sulit membedakan bangun-bangun geometri.¹¹⁵

Sedangkan mata pelajaran lain mereka tidak mengalami kesulitan yang signifikan atau berarti.

- 9) Anak autisme adalah anak yang mengalami kelainan tumbuh kembang yang ditandai dengan tidak adanya kontak dengan orang lain dan asyik dengan dunianya sendiri.¹¹⁶ Mereka tidak tuli dan tidak tunawicara. Mereka juga belum tentu berintelektensi rendah. Adanya keterlambatan dalam perolehan berbahasa dan perilaku bahasanya yang demikian maka dikatakan bahasanya "bahasa planet". Selain itu, anak autisme juga mengalami gangguan komunikasi, berperilaku khusus, dan gangguan interaksi sosial. Anak autisme di Indonesia mencuat atau banyak dibicarakan baru di akhir tahun 90-an, sedangkan di luar negeri sudah jauh dari itu sekitar tahun 50-an. Anak-anak autisme paling banyak diderita oleh anak laki-laki. Secara sepihak, fisik anak autisme tidak menunjukkan perbedaan dengan anak-anak lain pada umumnya, hanya saja ketika dipanggil atau diajak berkomunikasi mereka tidak menunjukkan respon yang baik dan tidak ada kontak.¹¹⁷ Dengan adanya tanda-tanda yang

¹¹⁴ Hermanto. 8

¹¹⁵ Anjaryati, "Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Beyond Centers And Circle Times (BCCT) di PAUD Inklusi Ahsanu Amala Yogyakarta." 12

¹¹⁶ Rahayu, "Kemampuan Komunikasi Anak Autis dalam Interaksi Sosial (Kasus Anak Autis di Sekolah Inklusi, SD Negeri Giwangan Kotamadya Yogyakarta)." 32

¹¹⁷ "Muhibbin Syah, 2003. Psikologi Belajar. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, h. 1," 2003, 20-37.

demikian maka keberadaan anak autisme ini juga sangat mungkin ditemukan di sekolah dasar.¹¹⁸

b. Manajemen Guru

Sikap guru sangat di pengaruhi oleh semua komponen yang ada di sekolah, bagaimana Avramidis dan Norwich merangkum berbagai penelitian mengenai faktor yang memengaruhi sikap guru, sebagai berikut.¹¹⁹

- (a) Konsep guru terhadap siswa berkebutuhan khusus biasanya bergantung pada jenis hambatan siswa, tingkat keparahan hambatan siswa, dan kebutuhan siswa akan pendidikan¹²⁰. Persepsi guru mengenai jenis hambatan siswa dapat dibedakan berdasarkan tiga dimensi, yaitu hambatan fisik dan sensori, kognitif, dan perilaku emosional yang dimiliki siswa.
- (b) Guru faktor guru terbagi dalam beberapa variabel, yaitu gender faktor gender ini berkaitan dengan isu gender terhadap inklusi. Beberapa peneliti menemukan bahwa guru perempuan memiliki toleransi yang lebih tinggi dibandingkan guru laki-laki terhadap integrasi untuk siswa berkebutuhan khusus.¹²¹

Ada kecenderungan pada guru perempuan dalam menunjukkan sikap positif terhadap ide mengenai integrasi terhadap anak yang memiliki masalah perilaku dibandingkan guru laki-laki.¹²² Usia dan pengalaman mengajar guru yang lebih muda dan dengan pengalaman mengajar yang masih sedikit memiliki sikap yang mendukung terhadap integrasi. Muncul keengganan pada guru yang telah berpengalaman dibandingkan

¹¹⁸ Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Vol. 2, No. 01, Februari 2013, 23

¹¹⁹ Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Vol. 2, No. 01, Februari 2013, 45-47

¹²⁰ Clough and Lindsay, 1991 dalam Avramidis and Norwich, 2002, 12

¹²¹ Aksamit, Morris, and Leunberger, 1987; Thomas, 1985; Eichinger, Rizzo, and Strotnik, 1991 dalam Avramidis and Norwich, 2002) 17

¹²² Darma and Rusyidi, "Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia [The Implementation of Inclusive Schools in Indonesia]." 1-9



dengan guru pelatihan yang bersedia menerapkan program integrasi kepada siswa berkebutuhan khusus.¹²³

Hal ini dapat menjadi sebuah alasan bahwa guru baru yang memenuhi syarat memiliki sikap yang positif terhadap program integrasi. Tingkat kelas yang diajar seiring dengan bertambahnya usia siswa, maka sikap positif yang dimiliki guru akan berkurang, dan menunjukkan fakta bahwa guru yang mengajar kelas yang lebih tinggi lebih memperhatikan pada materi pelajaran dibandingkan memperhatikan pada perbedaan individu siswa.¹²⁴ Bagi guru yang lebih memperhatikan materi pelajaran, kehadiran siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas mereka menjadi masalah tersendiri dalam praktik pengurusan aktivitas kelas.

Pengalaman kontak dengan siswa berkebutuhan khusus semakin dekat, maka sikap yang dimiliki guru semakin positif. Faktor lain yang memengaruhi sikap guru yang menarik adalah pengetahuan yang dimiliki mengenai siswa berkebutuhan khusus yang dikembangkan melalui pelatihan yang didapat. Faktor ini dipertimbangkan menjadi faktor penting dalam memengaruhi sikap guru terhadap pelaksanaan kebijakan inklusi.¹²⁵ Tanpa rencana untuk memberikan pelatihan kepada guru mengenai pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus, maka akan sulit mengikutsertakan siswa tersebut ke dalam kelas mainstream.¹²⁶

Guru yang beranggapan bahwa kebutuhan khusus merupakan sesuatu yang melekat dengan siswa, memiliki cara mengajar yang kurang efektif dibandingkan dengan guru yang beranggapan bahwa lingkungan di sekitar siswa dapat menjadi pelengkap bagi masalah atau hambatan yang dimiliki siswa.¹²⁷

¹²³ Sri Kartini Dewi A et al., "Belajar Melalui Bermain untuk Pengembangan Kreativitas dan Kognitif Anak Usia Dini," *Surya* 4, no. 2 (2016): 1–10, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

¹²⁴ Salvia dan Munson 1986 dalam Avramidis and Norwich, 2002, 65-67

¹²⁵ Syafrida Elisa and Aryani Tri Wrastari, "Sikap Guru terhadap Pendidikan Inklusi Ditinjau dari Faktor Pembentuk Sikap," *Jurnal Psikologi Perkembangan Dan Pendidikan* 2, no. 01 (2013): 1–10.

¹²⁶ Mambela, "Mainstreaming Sebagai Alternatif Penanganan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia."4

¹²⁷ Ibid 9

Pandangan sosio-politik factor, ini menjelaskan mengenai sikap guru terkait dengan keyakinan personal (pandangan terhadap politik dan sosial politik) dan sikap personal, faktor ini juga menjelaskan mengenai keyakinan guru terhadap etnis dan budaya dari anak berkebutuhan khusus dan keyakinan tentang dukungan pemerintah terhadap pendidikan inklusi.¹²⁸

Lingkungan pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi sikap positif guru di antaranya adalah ketersediaan dukungan fasilitas di dalam kelas dan level sekolah.¹²⁹ Dukungan yang dimaksud dalam hal ini adalah, sumber daya fisik seperti, perlengkapan mengajar, perlengkapan, IT, lingkungan fisik yang mendukung, dan lain-lain. Serta sumber daya manusia, seperti, guru khusus, terapis, kepala sekolah, orang tua, dan lain-lain. melihat sikap guru terhadap inklusi melalui faktor jenis guru dan latar belakang pendidikan guru.

Jenis guru yang dimaksud adalah, guru khusus atau guru reguler, sedangkan latar belakang pendidikan guru terkait dengan pendidikan terakhir yang dimiliki guru.¹³⁰ Keinginan anak berkebutuhan khusus untuk dilayani dan mempunyai ide, gagasan, sungguhpun ide tersebut kecil dan tidak berarti. Mereka juga menyimpan pertanyaan dan permasalahan namun sulit untuk mengekspresikannya.¹³¹ Anak berkebutuhan khusus juga ingin diakui sebagai anggota keluarga, dan diakui didepan temannya, mendapat kedudukan dalam kelompok, mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Pada dasarnya kebutuhan anak berkebutuhan khusus sama dengan anak-anak lain pada umumnya (kebutuhan jasmani dan rohani). Namun ada hal-hal khusus yang membutuhkan penanganan khusus, biasanya

¹²⁸ Johandri Taufan and Fachri Mazhud, "Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi," *Jurnal Penelitian Pendidikan* 14, no. 1 (2016). 2-9

¹²⁹ Center and Ward, 1987; Myles and Simpson, 1989; Clough and Lindsay, 1991 dalam Avramidis and Norwich, 2002, 15

¹³⁰ Budiman, "Efektivitas Pembelajaran Agama Islam pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus." 15

¹³¹ Baharun and Awwaliyah, "Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Epistemologi Islam." 17



berkaitan dengan kelainan atau kecacatan yang disandanginya.¹³²

Di dalam prosesnya dapat berupa pendidikan, pembelajaran yang mendidik dan memandirikan, terapi, layanan bimbingan dan konseling, layanan medis, dll.¹³³ Penanganan itu tentunya dilakukan oleh profesi yang sesuai dengan bidangnya. Artinya, banyak ahli yang terlibat dalam rangka memenuhi kebutuhan ABK itu. Sehingga dikenal dengan pendekatan multidisipliner. Para ahli dari berbagai bidang berkolaborasi memberikan layanan yang terbaik.¹³⁴ untuk memenuhi kebutuhan ABK agar berkembang secara optimal. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, menurut Thompson ada beberapa hal yang harus diketengahkan sebagai berikut.¹³⁵

- 1) Mengetahui dan memahami potensi dan kekuatan dan tugas perkembangannya
- 2) Mengetahui dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya
- 3) Mengetahui dan menentukan tujuan dan rencana hidup dan pencapaian tujuan tersebut.
- 4) Mengetahui dan mengatasi kesulitan.

Sumber daya manusia yang dialokasikan untuk kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yaitu meliputi.¹³⁶

- (a) Guru kelas dan guru mata pelajaran;
- (b) Guru pendidik khusus;

¹³² Umbulharjo Yogyakarta, "Studi Kasus Proses Pembelajaran Inklusi di Tk Islam Pelangi Anak Negeri Umbulharjo Yogyakarta Case Study of Inclusion Learning Process in Tk Islam Pelangi Anak Negeri Umbulharjo Yogyakarta," 2013, 1020-29.2-15

¹³³ Awwad, "Urgensi Layanan Bimbingan dan Konseling Bagi Anak Berkebutuhan Khusus."2

¹³⁴ Takdir Ilahi, Pendidikan Inklusi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 145.

¹³⁵ Ibid, 146

¹³⁶ Yusuf, Choiri, and Supratiwi, "Evaluation of Inclusive Education Policies at the Level of Primary and Secondary Education in Indonesia (Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia)."67

- (c) Tenaga kependidikan lain dan profesional lain psikolog,;
- (d) Bimbingan konseling, terapis -tenaga medis/paramedis.

Dalam hal ini, sumber daya manusia yang dialokasikan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi semua guru mata pelajaran, guru pendidik khusus 6 orang, team khusus inklusi, tenaga kependidikan lain dan profesioanal lain; psikolog dari pendidikan luar biasa, tenaga medis. Sedangkan untuk tenaga pekerja sosial pendidikan dan tenaga terapis belum dialokasikan.¹³⁷

d) Manajemen Sumber Daya Nonmanusia

Sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dialokasikan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat bersumber dari dana pemerintah APBN dan APBD sesuai anggaran pendidikan yang berlaku.¹³⁸ Dana tersebut dapat berupa BSM dan BOP, bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Jawa Timur yang pertama yaitu BSM, pemerintah mengalokasikan anggaran pada tahun 2013 untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif masing-masing siswa berkebutuhan khusus mendapat bantuan sebesar Rp. 1.150.000,00 bantuan tersebut diberikan pihak sekolah untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa berkebutuhan khusus. Bantuan yang kedua yaitu BOP, pemerintah mengalokasikan anggaran pada tahun 2013 untuk pendidikan inklusi masing-masing sekolah mendapat bantuan sebesar Rp. 35.000.000,00. Selain bantuan dari pemerintah pusat, penyelenggaraan pendidikan inklusif juga mendapat bantuan dari pemerintah daerah Jawa Timur yang bersumber dari APBD.

Pemprov JATIM mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jawa Timur setiap

¹³⁷ Ibid 98

¹³⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia, "Target Kemendikbud dalam Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017," Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. 13



sekolah diberikan bantan sebesar Rp. 10.000.000,00. Sumber daya peralatan yang dialokasikan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif sudah terpenuhi sesuai dengan karakter masing-masing peserta didik dari variabel lingkungan implementasi mencakup beberapa subvariabel, pertama kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat” dalam mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya memegang kekuasaan penuh atas penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya merupakan pembina penyelenggaraan pendidikan inklusif ditingkat Kota. Sehingga dapat diketahui bahwa kekuasaan berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya dalam hal mengambil suatu keputusan maupun kebijakan. Sedangkan untuk kegiatan secara teknis lapangan kewenangan atau kekuasaan penuh ada pada kepala sekolah, karena kepala sekolah mengetahui secara langsung kondisi di lapangan.¹³⁹

Kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif agar implementasi ini dapat berhasil, memberikan layanan penuh dan dirasakan oleh semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam akses pendidikan tanpa adanya diskriminasi.¹⁴⁰ Pada dasarnya agar kebijakan yang dilaksanakan bisa berhasil dengan baik, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan miliki potensi kecerdasan yang istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini juga mendapatkan respon positif dari target grup

Pemerintah menyatakan bahwa kurikulum yang dipakai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi adalah Kurikulum

¹³⁹ Ibid, 101

¹⁴⁰ Jurnal Pendidikan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016 Halaman : 89 - 97 ISSN: 2527-6891

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya¹⁴¹. Sedangkan model kurikulum pendidikan inklusi terdiri dari.¹⁴²

6. Model kurikulum reguler model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama.
7. Model kurikulum reguler dengan modifikasi model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Di dalam model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan khusus yang madrasah ibtidaiyah liki PPI.¹⁴³
8. Model kurikulum program pembelajaran individual (PPI) model kurikulum PPI yaitu kurikulum yang dipersiapkan guru program PPI

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan merupakan salah satu indikator mutu pendidikan. Acuan kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah kurikulum standar nasional yang berlaku di sekolah umum, namun karena ragam hambatan yang dialami peserta didik berkelainan sangat bervariasi, mulai dari yang ringan, sedang sampai yang berat. Dalam implementasinya, kurikulum yang sesuai dengan standar nasional perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan hambatan dan kebutuhan peserta

141 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Atau Bakat Istimewa, Pasal 7.

¹⁴²Yusuf, Choiri, and Supratiwi, "Evaluation of Inclusive Education Policies at the Level of Primary and Secondary Education in Indonesia (Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Di Indonesia)." ; Lewis et al., "Time to Stop Polishing the Brass on the Titanic: Moving beyond 'Quick-and-Dirty' Teacher Education for Inclusion, towards Sustainable Theories of Change." ; Direktorat, Pedoman Umum..., H. 19.

¹⁴³ Heng, Quinlivan, and du Plessis, "Exploring the Creation of a New Initial Teacher Education (ITE) Programme Underpinned by Inclusion."



didik. Kurikulum adaptif adalah kurikulum yang dimodifikasi dan diadaptasi atau disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi, kemampuan dan keterbatasan peserta didik. Dalam kurikulum adaptif, rancangan program pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing siswa berkebutuhan khusus. Modifikasi (penyelarasan) kurikulum adaptif diterapkan pada empat komponen utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Modifikasi (penyelarasan) kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim sekolah terdiri dari: kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, konselor, psikolog, dan ahli yang terkait. Tim sekolah juga berperan dalam asesmen dan penyaringan siswa berkebutuhan khusus. Pada kurikulum adaptif, guru melakukan modifikasi pada tujuan, materi, proses dan evaluasi dengan tetap mengacu pada kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus berkolaborasi dalam pelaksanaan kurikulum adaptif di sekolah penyelenggara inklusi.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, idealnya memiliki kurikulum adaptif untuk siswa berkebutuhan khusus. Kurikulum adaptif dalam bentuk PPI (program pembelajaran individual) untuk tiap masing-masing siswa. Dari beberapa sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, belum semua guru sekolah penyelenggara inklusi mengerti tentang kurikulum adaptif. Selain itu belum semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusi memiliki PPI (program pembelajaran individual) bagi setiap siswa berkebutuhan khusus karena keterbatasan guru pembimbing khusus (GPK). Beberapa sekolah hanya memiliki satu GPK untuk satu sekolah.

H. Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Peran Tenaga Pendidik di sekolah inklusi meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendidikan khusus (GPK). Thomas M. Stephens menyatakan bahwa pengelolaan yang melayani kebutuhan unik peserta didik dan merupakan layanan yang disediakan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan serta bagaimana efektivitas program

tersebut akan ditentukan.¹⁴⁴ Tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan inklusi. Tenaga kependidikan dalam pendidikan inklusi mendapat porsi tanggung jawab yang jelas berbeda dengan tenaga kependidikan pada pendidikan non inklusi.¹⁴⁵ Perbedaan yang terdapat pada individu meniscayakan adanya kompetensi yang berbeda dari tenaga kependidikan lainnya. Tenaga kependidikan secara umum memiliki tugas seperti menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.¹⁴⁶

Guru yang terlibat di sekolah inklusi yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus. Manajemen tenaga kependidikan antara lain meliputi: (1) inventarisasi pegawai, (2) pengusulan formasi pegawai, (3) pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan berkala, dan mutasi, (4) mengatur usaha kesejahteraan, (5) mengatur pembagian tugas.¹⁴⁷

Sedangkan, pendanaan pendidikan inklusi memerlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang baik. Walaupun penyelenggaraan pendidikan inklusi dilaksanakan pada sekolah reguler dengan penyesuaian-penyesuaian, namun tidak serta merta pendanaan penyelenggaraannya dapat diikutkan begitu saja dengan pendanaan sekolah reguler.¹⁴⁸ Maka diperlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi dan mengatasi berbagai

¹⁴⁴ Reza Dulisanti, "Penerimaan Sosial dalam Proses Pendidikan Inklusif (Studi Kasus Pada Proses Pendidikan Inklusif di Smk Negeri 2 Malang)," *Indonesian Journal of Disability Studies (Ijds)* 2, No. 1 (2015).

¹⁴⁵ Lani Florian, "On the Necessary Co-Existence of Special and Inclusive Education," *International Journal of Inclusive Education* 23, no. 7-8 (2019): 691-704, <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1622801>; Smith, "Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua

¹⁴⁶ Attwood, MacArthur, and Kearney, "Beginner Secondary Teacher Preparedness for Inclusion."; Gonzales, "Cultivating Familismo: Belonging and Inclusion in One Latina/o Learning Community."

¹⁴⁷ Mahabbati, "Kebijakan, Implementasi dan Isu Strategis Pendidikan bagi Individu Berkebutuhan Khusus." ; Studi, Matematika, And Surakarta, "Pasca Implementasi Program Pendidikan Inklusi." 2007 87-90

¹⁴⁸ Hardiansah, "Pengantar Edisi Khusus 55 Tahun Pendidikan Planologi: Pembangunan Kota Inklusif di Era Desentralisasi." ; Ulpha Lisni Azhari and Dedy Achmad Kurniady, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah," *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2016



permasalahan terkait dengan pendanaan.¹⁴⁹ Contoh pembiayaan pendidikan inklusi untuk wilayah DKI Jakarta bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran Dinas Dikdas, Dinas Dikmenti, dan Kanwil Depag dan sumber lain yang sah. Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk lembaga pendidikan swasta dibebankan pada anggaran yayasan/lembaga pendidikan swasta yang bersangkutan.¹⁵⁰

Program Pembelajaran Individual meliputi enam komponen, yaitu.

- 1) *Elicitors*, yaitu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan atau menyebabkan perilaku;¹⁵¹
- 2) *Behaviors*, merupakan kegiatan peserta didik terhadap sesuatu yang dapat ia lakukan;
- 3) *Reinforcers*, suatu kejadian atau peristiwa yang muncul sebagai akibat dari perilaku dan dapat menguatkan perilaku tertentu yang dianggap baik;¹⁵²
- 4) *Entering behavior*, kesiapan menerima pelajaran;
- 5) *Terminal objective*, sasaran antara dari pencapaian suatu tujuan pembelajaran yang bersifat tahunan;
- 6) *Enroute*, langkah dari *entering behavior* menuju ke *termadrasah ibtidaiyah nal objective*.¹⁵³

I. Kearifan Lokal

1. Pengertian Kearifan Lokal

Pengertian Kearifan Lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*).

¹⁴⁹Rahayu, "Kemampuan Komunikasi Anak Autis dalam Interaksi Sosial (Kasus Anak Autis di Sekolah Inklusi, SD Negeri Giwangan Kotamadya Yogyakarta)." 2019 45-47

¹⁵⁰ Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Pasal 16 dan Pasal 17. Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tidak Ditangani Oleh Pemerintah Pusat. Hal Ini dapat Dilihat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Tidak Ada Satu Pasalpun Yang Menyebutkan Bahwa Pemerintah Pusat Terlibat dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

¹⁵¹ Florian, "On the Necessary Co-Existence of Special and Inclusive Education."

¹⁵² Gonzales, "Cultivating Familismo: Belonging and Inclusion in One Latina/o Learning Community."

¹⁵³ Wijaya et al., "Implementasi Konsep 'Harmony in Equality' pada Desain Interior Sekolah Inklusi Galuh Handayani Surabaya." Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), H. 1

Local berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan.¹⁵⁴ Dengan kata lain maka local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.¹⁵⁵ Dalam disiplin antropologi dikenal istilah *local genius*.¹⁵⁶ Kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (*indigenous knowledge systems*) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka.¹⁵⁷ Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (*daily problem solving*). Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal (*local culture*).¹⁵⁸

Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan budaya daerah sebagai "suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya."¹⁵⁹ Di Indonesia istilah budaya lokal juga sering disepadankan dengan budaya etnik/ subetnik.

¹⁵⁴Ahmad Sudi Pratikno and Dewi Nur Masita, "Gerakan Sosial Melalui Sosio Drama Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Nasionalisme Daerah Pedalaman," *Proceeding of Community Development* 1 (2018): 36–40. : Imam Suyitno, "Pengembangan Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal," *Jurnal Pendidikan Karakter*, No. 1 (2012)

¹⁵⁵ Fauzi, "Pendidikan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal dalam Praktik Sosial di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur."

¹⁵⁶ Sri Kartini Dewi A et al., "Belajar Melalui Bermain untuk Pengembangan Kreativitas dan Kognitif Anak Usia Dini," *Surya*, 2016, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

¹⁵⁷ Basa Peserta, Didik Kelas, and I V Min, "Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Jawa Pokok Bahasan Unggah-Ungguh," 2017.

¹⁵⁸Pgsd Fip and Universitas Negeri, "Penggunaan Model Tandur Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Siswa Kelas Ii Sdn Sidomulyo II," n.d. : Imam Sutyitno, "Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal Imam," *Jurnal Pendidikan Karakter* 2, no. 1 (2012): 1–13, <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1316/1094>

¹⁵⁹ Ahmad Sudi Pratikno And Dewi Nur Masita, "Gerakan Sosial Melalui Sosio Drama Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Nasionalisme Daerah Pedalaman," *Proceeding Of Community Development* 1 (2018): 36–40.



Setiap bangsa, etnik, dan sub etnik memiliki kebudayaan yang mencakup tujuh unsur, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup, dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian.¹⁶⁰

2. Jenis-jenis kearifan lokal, antara lain.¹⁶¹
 - a. Tata kelola, berkaitan dengan kemasyarakatan yang mengatur kelompok sosial (kades).
 - b. Nilai-nilai adat, tata nilai yang dikembangkan masyarakat tradisional yang mengatur etika.
 - c. Tata cara dan prosedur, bercocok tanam sesuai dengan waktunya untuk melestarikan alam.
 - d. Pemilihan tempat dan ruang.

Secara umum, kearifan lokal (dalam situs Departemen Sosial RI) dianggap pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.¹⁶² Dengan pengertian-pengertian tersebut, kearifan lokal bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas semata melainkan nilai tradisi yang mempunyai daya-guna untuk mewujudkan harapan atau nilai-nilai kemapanan yang juga secara universal yang didamba-damba oleh manusia.

Kearifan lokal menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dengan cara itulah, kearifan lokal dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal. Penerimaan masyarakat pada kearifan lokal inilah yang menjadi magnet atas banyak program yang diharapkan mampu menarik masyarakat di dalamnya.¹⁶³

3. Ciri-ciri kearifan lokal

¹⁶⁰ Sutrisna Wibawa et al., "Implementasi Pembelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal," no. September (2007): 1-14.

¹⁶¹ Ahmad Fauzi, "Pendidikan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal dalam Praktik Sosial di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur," In Proceedings Of Annual Conference For Muslim Scholars, 2017, 715-25.

¹⁶² Imam Sutyitno, "Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal Imam," Jurnal Pendidikan Karakter 2, no. 1 (2012): 1-13, <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1316/1094>.

¹⁶³ Pratikno And Masita, "Gerakan Sosial Melalui Sosio Drama Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Nasionalisme Daerah Pedalaman."

Sementara unsur budaya daerah potensial sebagai local genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah.¹⁶⁴

- a. Mampu bertahan terhadap budaya luar;
- b. Meliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar;
- c. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli;
- d. Mempunyai kemampuan mengendalikan;
- e. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

4. Kearifan local Bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari

Bahasa Jawa dituturkan oleh masyarakat Indonesia terutama di pulau Jawa bagian tengah dan timur. Namun, di pulau-pulau yang lainnya juga terdapat penutur bahasa Jawa. Bahkan di luar negeri pun juga terdapat penutur-penutur bahasa Jawa, di antaranya negara Suriname, Kaledonia Baru, Malaysia, dan Singapura.¹⁶⁵ Budaya Jawa dikenal adanya filsafat hidup yang menjunjung moral yaitu unggah-ungguh. Namun demikian ternyata masih ada sedikit remaja yang tetap konsisten menggunakan bahasa Jawa Krama ketika berkomunikasi dengan orang tua ataupun orang yang dituakan. Bahasa Jawa dalam pengamalannya secara umum sehari-hari, tingkat tutur dalam Bahasa Jawa, dapat diambil kategori.¹⁶⁶

- a. Bahasa Jawa Ngoko, mencerminkan makna tidak berjarak atau berjarak antara penutur dengan mitra tutur;
- b. Bahasa Jawa Krama, mencerminkan makna penghormatan antara penutur dengan Mitra tutur. Bentuk krama sebagai wujud bentuk kebahasaan yang mencerminkan rasa hormat masih digunakan sebagai alat komunikasi dalam masyarakat tutur Jawa, baik secara lisan maupun tulisan.¹⁶⁷

¹⁶⁴sutyitno, "Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal Imam."12-34

¹⁶⁵ Donald Qomaidiansyah Tungkagi, "Varian Islam Nusantara: Jawa, Minangkabau dan Gorontalo," *Jurnal Lektur Keagamaan* 15, no. 2 (2017): 273, <https://doi.org/10.31291/jlk.v15i2.524>.

¹⁶⁶ Pgsd Fip And Universitas Negeri, "Penggunaan Model Tandur untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Siswa Kelas Ii Sdn Sidomulyo Ii," N.d.

¹⁶⁷ Wibawa et al., "Implementasi Pembelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal."



Bahasa Jawa merupakan warisan nenek moyang yang sangat adiluhung karena di dalamnya terdapat unggah-ungguh bahasa yang berfungsi sebagai pembentukan perilaku kehidupan manusia.¹⁶⁸ Masyarakat Jawa juga mengenal idiom *ajining dhiri ono ing lathi*, yang melambangkan bahwa orang yang pandai bertutur dan menggunakan unggah ungguh dalam bertutur maka dia akan lebih dihargai oleh lawan tuturnya. Pembicara/orang yang mengajak bicara akan menggunakan tingkat tutur tertentu dengan mempertimbangkan unggah-ungguh, sehingga terjadilah kesantunan berbahasa.¹⁶⁹

c. Fungsi Bahasa Jawa

Anton Moeliono menyatakan¹⁷⁰ bahasa memiliki lima fungsi pokok, yaitu.

- 1) Fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan atau kedaerahan;
- 2) Fungsi sebagai bahasa perhubungan luas pada taraf subnasional, nasional, atau internasional;
- 3) Fungsi sebagai bahasa untuk tujuan khusus;
- 4) Fungsi sebagai bahasa dalam sistem pendidikan sebagai pengantar dan objek studi, dan
- 5) Fungsi sebagai bahasa kebudayaan di bidang seni, ilmu, dan teknologi.

Berdasarkan politik bahasa nasional dan kajian fungsi bahasa tersebut, pengajaran bahasa daerah setidaknya harus diarahkan pada tiga fungsi pokok, yaitu.¹⁷¹

- 1) alat komunikasi,
- 2) edukatif,
- 3) kultural.

¹⁶⁸ Susilana R Wahyudin D, "Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran," *Kurikulum Pembelajaran*, 2011.

¹⁶⁹ Witri Nur Laila, Konsep Diri, and Jawa Krama, "Konsep Diri Remaja Muslim Pengguna Bahasa" **09 (n.d.): 61–69**.

¹⁷⁰ fip And Negeri, "Penggunaan Model Tandur untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Siswa Kelas Ii SDN Sidomulyo II."

¹⁷¹ Nuriten Dinar et al., "Kearifan Lokal Sebagai Media Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Anak Usia Dini melalui Strategi Dongkrak," *Integritas Jurnal Antikorupsi* 02, no. 1 (2016): 135, <https://acch.kpk.go.id/id/jurnal-integritas-volume-02/nomor-1>.

Fungsi alat komunikasi diarahkan agar siswa dapat menggunakan bahasa daerah secara baik dan benar untuk keperluan alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat. Fungsi edukatif diarahkan agar siswa dapat memperoleh nilai-nilai budaya daerah untuk keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Fungsi kultural agar dapat digali dan ditanamkan kembali nilai-nilai budaya daerah sebagai upaya untuk membangun identitas dan menanamkan filter dalam menyeleksi pengaruh budaya luar. Pada fungsi pertama, bahasa sebagai alat komunikasi yang diarahkan agar siswa dapat berbahasa daerah dengan baik dan benar, mengandung nilai kearifan lokal hormat atau sopan santun. Seperti diketahui bahwa dalam bahasa daerah (bahasa Jawa) berlaku penggunaan bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh, dan dalam unggah-ungguh itu terkandung nilai-nilai hormat di antara para pembicara¹⁷², yaitu orang yang berbicara (O1) orang yang diajak berbicara (O2), orang yang dibicarakan (O3). Sebagai contoh, untuk menyatakan keadaan sedang makan, jika yang berbicara (O1) anak dan yang dibicarakan (O3) bapak, menggunakan kalimat “bapak, *nembe dhahar*” (bapak baru makan), jika yang sedang makan orang yang berbicara (O1) anak, menggunakan kalimat “*kula saweg nedha*” (saya sedang makan). Penggunaan kata dhahar (makan) merupakan realisasi dari rasa hormat kepada orang tua.

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar dan menengah dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sampai dengan 18 tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih tinggi¹⁷³. Seringkali kali terjadi miskonsepsi dari masyarakat dan orang tua terhadap esensi dan karakteristik pendidikan dasar dan menengah. Esensi pendidikan dasar adalah “paspor” bagi setiap peserta didik untuk pengembangan dirinya di masa depan, dan “bekal dasar” untuk dapat hidup layak dalam hidup bermasyarakat dimanapun di dunia ini.

¹⁷² sutitno, “Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal Imam.”

¹⁷³ Kama Abdul Hakam, “Pengembangan Model Pembudayaan Nilai-Moral dalam Pendidikan Dasar di Indonesia : Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 1 Kota Malang , Jawa Timur,” *Sosiohumanika* 4, no. 2 (2011): 159–84.



Oleh karenanya, program belajar pendidikan dasar harus mengembangkan potensi peserta didik secara terpadu dan sinergi.¹⁷⁴ Pola pembelajaran pada tingkat pendidikan dasar harus dilakukan secara terpadu, karena secara psikologis perkembangan kemampuan kognisi, kemampuan sosio-emosional, kemampuan pengembangan moral dan perkembangan fisik peserta didik usia pendidikan dasar terjadi secara terpadu dan saling ketergantungan.

Sedangkan pendidikan menengah merupakan awal dari penguatan dan pengembangan potensi dominan peserta didik yang terpotret pada jenjang pendidikan dasar. Dengan demikian, program belajar dan pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah harus memperhatikan pengembangan potensi dominan peserta didik,¹⁷⁵ sehingga program belajar pada jenjang pendidikan menengah dapat mendukung suksesnya kehidupan peserta didik, baik pengembangan individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Untuk mendukung keberhasilan pendidikan dasar dan menengah seperti yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka penyelenggaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memenuhi ketentuan tentang standar nasional pendidikan, dalam aspek-aspek, meliputi 1) isi kurikulum, 2) lulusan, 3) proses pembelajaran, 4) pendidik dan tenaga kependidikan, 5) sistem pengelolaan, 6) sarana dan prasarana pendidikan, 7) pembiayaan pendidikan, dan 8) sistem penilaian pendidikan.¹⁷⁶ Pendahuluan Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang sangat cepat serta globalisasi yang dewasa ini terjadi berdampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat, baik kehidupan individu maupun sosial kemasyarakatan. Dampak positif dari perkembangan iptek dan globalisasi tersebut adalah terbukanya peluang pasar kerja sesuai dengan kebutuhan

¹⁷⁴ Maimuna Ritonga, "Politik dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Hingga Masa Reformasi," *Bina Gogik* 5, no. 2 (2018): 1–15.

¹⁷⁵ Hakam, "Pengembangan Model Pembudayaan Nilai-Moral dalam Pendidikan Dasar di Indonesia : Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 1 Kota Malang , Jawa Timur."

¹⁷⁶ Wahyu Nanda Eka Saputra, "Pendidikan Kedamaian: Peluang Penerapan pada Pendidikan Tingkat Dasar di Indonesia," *Jurnal CARE (Children Advisory Research and Education)* 3, No. 3 (2016): 88–94.

masyarakat dan negara.¹⁷⁷ Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya perubahan nilai dan norma kehidupan yang seringkali kontradiksi dengan norma dan nilai kehidupan yang telah ada di masyarakat.

Dalam konteks inilah pendidikan, khususnya pendidikan dasar, berperan sangat penting untuk memelihara dan melindungi norma dan nilai kehidupan positif yang telah ada di masyarakat suatu negara dari pengaruh negatif perkembangan iptek dan globalisasi. Proses pendidikan yang benar dan bermutu memberikan bekal dan kekuatan untuk memelihara "jatidiri" dari pengaruh negatif globalisasi, bukan hanya untuk kepentingan individu peserta didik, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, proses pendidikan itu terjadi di masyarakat, dengan menggunakan berbagai sumber daya masyarakat dan untuk masyarakat, maka pendidikan dituntut untuk mampu memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan secara simultan.

Pengembangan pendidikan untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara yang lebih baik perlu dirancang secara terpadu sejalan dengan aspek-aspek tersebut di atas, sehingga pendidikan merupakan wahana pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjadi subjek pengembangan iptek dan globalisasi. Selain itu, pengembangan pendidikan secara mikro harus selalu memperhitungkan individualitas atau karakteristik perbedaan antar individu peserta didik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dengan demikian, kerangka acuan pemikiran dalam penataan dan pengembangan pendidikan dasar dan menengah harus mampu mengakomodasikan berbagai pandangan tentang esensi dan fungsinya secara selektif, sehingga terdapat keterpaduan dalam pemahaman terhadap pendidikan dasar dan menengah tersebut. Dengan pemahaman yang sinergis terhadap esensi dan fungsi pendidikan dasar dan menengah tersebut, diharapkan masa depan jenjang pendidikan ini di Indonesia akan lebih efektif dan lebih bermutu dalam penataannya, sehingga memberikan kontribusi yang

¹⁷⁷ Atin Supriatin and Aida Rahmi Nasution, "Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia," *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 3, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.32332/elementary.v3i1.785>.



signifikan terhadap pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.¹⁷⁸

Komisi Pendidikan untuk abad ke 21 melihat bahwa pendidikan dasar masa depan merupakan sebuah “paspor” untuk hidup. Pendidikan dasar untuk anak dikonsepsikan sebagai pendidikan awal untuk setiap anak (formal atau nonformal) yang pada prinsipnya berlangsung dari dari usia sekitar tiga tahun sampai dengan sekurang-kurangnya berusia dua belas sampai lima belas tahun. Pendidikan dasar sebagai sebuah “paspor” yang sangat diperlukan individu untuk hidup dan mampu memilih apa yang mereka lakukan, mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat masa depan secara kolektif, dan terus menerus belajar.¹⁷⁹

Dengan demikian, pendidikan dasar memberikan sebuah surat jalan yang sangat penting bagi setiap orang, tanpa kecuali untuk memasuki kehidupan dalam masyarakat setempat, dan masyarakat dunia, termasuk di dalamnya lembaga satuan pendidikan. Pendidikan dasar sangat berkaitan dengan kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang layak dan bermutu. Oleh karena itu, pendidikan dasar sangat erat dengan hak asasi manusia.¹⁸⁰ Hal ini sejalan dengan deklarasi Beijing tentang Perempuan, antara lain menyatakan sebagai berikut. Pendidikan adalah hak azasi manusia dan sebuah alat yang pokok untuk mencapai tujuan memperoleh kesamaan, perkembangan, dan perdamaian.

Pendidikan yang tidak diskriminatif memberikan keuntungan baik bagi anak-anak perempuan maupun anak laki-laki, dan dengan demikian pada akhirnya membantu untuk mencapai hubungan yang mempunyai kesamaan yang lebih besar antara perempuan dengan laki-laki. Kesamaan dalam kemudahan mendapatkan dan mencapai mutu pendidikan adalah perlu apabila lebih banyak perempuan harus menjadi agen perubahan.¹⁸¹ Perempuan yang melek huruf merupakan sebuah kunci penting untuk meningkatkan kesehatan,

¹⁷⁸ Munirah Munirah, “Sistem Pendidikan di Indonesia: Antara Keinginan dan Realita,” *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 2, no. 2 (2015): 233–45.

¹⁷⁹ Heri Widodo, “Potret Pendidikan di Indonesia dan Kesiapannya dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA),” *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan* 13, No. 2 (2016): 293–308.

¹⁸⁰ Sutyitno, “PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA BERWAWASAN KEARIFAN LOKAL Imam.”

¹⁸¹ Hakam, “Pengembangan Model Pembudayaan Nilai-Moral dalam Pendidikan Dasar di Indonesia : Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 1 Kota Malang , Jawa Timur.”

gizi, dan pendidikan dalam keluarga dan untuk memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat. Investasi dalam pendidikan formal dan nonformal serta latihan bagi para gadis dan perempuan, dengan hasil sosial dan ekonomi yang sangat tinggi, telah terbukti menjadi salah satu cara pencapaian perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan. Pada tahap awal, pendidikan dasar berusaha mengecilkan berbagai perbedaan yang alami dari berbagai kelompok masyarakat, seperti perempuan, penduduk pedesaan, orang miskin di kota, minoritas etnik yang bersifat marginal, dan beribu-ribu anak yang tidak bersekolah dan bekerja.

Pendidikan dasar dalam waktu yang sama bersifat universal dan spesifik. Pendidikan dasar harus memberikan hal umum yang mempersatukan semua manusia, sedangkan dalam waktu yang sama harus berkenaan dengan tantangan khusus dari setiap kelompok peserta didik yang sangat berbeda. Agar pendidikan dasar dapat terhindar dari pemisahan kualitas pendidikan yang dewasa ini membagi dunia menjadi dua kelompok, yaitu a) kelompok negara industri dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta¹⁸² pengetahuan dan keterampilan yang tersedia, dan b) kelompok negara sedang berkembang dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah, maka pendidikan dasar perlu untuk memperbaiki defisit pengetahuan di negara berkembang atau terbelakang. Dengan mendefinisikan keterampilan kognitif dan efektif yang perlu dikembangkan, serta sosok pengetahuan yang harus dimiliki peserta didik melalui pendidikan dasar, maka mungkin para ahli pendidikan dapat memberikan jaminan bahwa semua anak usia pendidikan dasar, baik yang ada di negara industri maupun di negara berkembang dapat mencapai tingkat kemampuan minimal dalam bidang-bidang keterampilan kognitif yang diperlukan dalam kehidupan mereka. Dalam hubungan ini,

Komisi Pendidikan untuk abad 21 mengutip Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua sebagai berikut setiap orang-anak, remaja, orang dewasa akan dapat memperoleh keuntungan dari kesempatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang pokok.¹⁸³ Keuntungan ini terdiri atas alat belajar yang pokok (seperti: melek huruf, ekspresi lisan, berhitung, dan pemecahan masalah) dan isi belajar yang pokok

¹⁸²

¹⁸³ Saputra, "Pendidikan Kedamaian: Peluang Penerapan pada Pendidikan Tingkat Dasar di Indonesia."



(seperti pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap) yang diperlukan oleh manusia untuk dapat bertahan hidup, mengembangkan kemampuan mereka secara penuh, hidup dan bekerja dengan bermartabat, berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan, meningkatkan mutu kehidupan mereka, membuat keputusan yang terinformasi, dan terus menerus belajar.

Dewasa ini, ada kecenderungan bahwa program pendidikan dasar yang bermutu hanya diorientasikan untuk orang dan kelompok tertentu, terutama pada institusi pendidikan yang diklaim oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan dasar “favorit”. Pada lembaga persekolahan ini tidak cukup ruang bagi kelompok lain untuk mengakses pendidikan tersebut. Apabila dibiarkan, maka kondisi ini dapat berdampak pada perlakuan yang diskriminatif terhadap anak bangsa. Di samping itu masih banyak anak usia sekolah dasar yang belum terjangkau oleh program pendidikan dasar. Atau kalaupun sekolah tersedia dalam jarak yang terjangkau, kendala-kendala psikologis dan budaya masih menghalangi mereka untuk memasuki sekolah. Untuk memecahkan masalah ini, perlu diakomodasi ide “pendidikan untuk semua” yang antara lain membuat kesempatan bagi semua siswa untuk mengakses pendidikan dasar di manapun dan kapanpun.

Di samping itu, perlu diciptakan suasana belajar yang dapat mengakomodasi kebutuhan anak dari berbagai strata dan latar belakang sosial dan budaya. Untuk mencapai sasaran pendidikan dasar yang bermutu selama ini masih banyak tergantung pada lembaga pendidikan formal yang konvensional atau sejumlah lembaga pendidikan nonformal,¹⁸⁴ baik yang langsung di bawah tanggung jawab pemerintah maupun swasta. Padahal untuk menjangkau semua peserta didik, kemampuan lembaga tersebut terbatas mengingat beragamnya kondisi geografis dan budaya masyarakat Indonesia.

Untuk itu, dalam rangka penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan untuk membelajarkan lebih banyak warga negara, perlu diupayakan pemberdayaan dan pendayagunaan berbagai institusi kemasyarakatan untuk menjadi wahana pendidikan dan pembelajaran program pendidikan dasar 9 tahun. Praktik pendidikan dasar di Indonesia jenjang pendidikan dasar merupakan jenjang terbawah dari sistem pendidikan nasional, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Program wajib belajar pendidikan

¹⁸⁴ Munirah, “Sistem Pendidikan di Indonesia: Antara Keinginan dan Realita.”

dasar 9 tahun merupakan perwujudan pendidikan dasar untuk semua anak usia 6-15 tahun. Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994, dan pelaksanaannya dimulai tahun ajaran 1994/1995.¹⁸⁵

Pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia terdiri atas 10 wahana dan empat rumpun, baik pada tingkat SD maupun SMP, yaitu (1) Rumpun SD dan SMP yang terdiri atas SD dan SMP Biasa, SD dan SMP kecil, dan SD dan SMP Pamong; (2) Rumpun SD dan SMP Luar Biasa yang terdiri atas SD dan SMP Luar Biasa, SDLB dan SMPLB, serta SD dan SMP Terpadu; (3) Rumpun Pendidikan Luar Sekolah yang terdiri atas Program Kelompok Belajar Paket A dan B (Kejar Paket A untuk setingkat SD dan Kejar Paket B untuk setingkat SMP), serta Kursus Persamaan SD dan SMP; (4) Rumpun Sekolah Keagamaan yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Pondok Pesantren.¹⁸⁶

J. Penelitian Terdahulu

1. Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Gadingan Wates dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Pagerharjo SaMadrasah Ibtidaiyah Galuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) keefektifan manajemen pendidikan inklusi (MPI) dilihat dari standar pelayanan Madrasah Ibtidaiyah nimum, (2) perbedaan MPI di Sekolah Dasar negeri dengan MPI di Sekolah Dasar swasta, (3) hambatan dalam pelaksanaan MPI, dan (4) solusi dan rekomendasi untuk menyelesaikan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan MPI. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian evaluasi dengan model *discrepancy*. Responden penelitian berjumlah 41 orang. Data dikumpulkan menggunakan angket dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk angka dan persentase, di mana data yang berwujud angka-angka tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam kata-kata atau kalimat. Hasil penelitian sebagai berikut. (1) MPI di Sekolah Dasar Negeri Gadingan dilihat dari standar pelayanan Madrasah Ibtidaiyah nimum termasuk dalam kategori sangat baik dan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Pagerharjo

¹⁸⁵ Ritonga, "Politik dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Hingga Masa Reformasi."

¹⁸⁶ Widodo, "Potret Pendidikan di Indonesia Dan Kesiapannya dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)."



termasuk kategori baik. (2) Perbedaan MPI di Sekolah Dasar Negeri Gadingan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Pagerharjo terletak pada komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. (3) Hambatan belum adanya pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi, Madrasah Ibtidaiyah nimnya jadwal guru pembimbing khusus untuk mendampingi guru reguler, Madrasah Ibtidaiyah nimnya anggaran, terbatasnya sarana dan prasarana. (4) Solusi: menyusun pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi, menambah waktu/jadwal guru pembimbing khusus untuk mendampingi guru reguler, mengusulkan penambahan anggaran dan memenuhi sarana dan prasarana, serta rekomendasinya: pengembangan wawasan dan pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan, optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana, dan pemenuhan kebutuhan anggaran/pembiayaan.¹⁸⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zumrotul Mukaffa, Taufik, dan M. Nuril Huda dengan judul Pengembangan Model Madrasah Inklusi (Studi atas Kesiapan dan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Inklusi Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Margorejo Surabaya) penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah yang terdiri dari peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus, dan juga dilatarbelakangi di wilayah Kota Surabaya model madrasah inklusi belum banyak ditemukan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesiapan madrasah menuju madrasah inklusi, dan mengembangkan salah satu produk yang dibutuhkan dalam pengembangan madrasah inklusi yaitu produk dokumen I kurikulum madrasah inklusi. Dalam prosesnya menggunakan model penelitian pengembangan. Hasil penelitian didapatkan. *Pertama*, 100% atau seluruh responden menyatakan siap menyambut perubahan dari madrasah reguler menjadi madrasah inklusi yang dibuktikan adanya ko tmen berpartisipasi, mempromosikan, dan menghindari resistensi terhadap perubahan. *Kedua*, model dokumen I kurikulum madrasah inklusi yang dikembangkan di Madrasah Al-Hidayah berdasarkan analisis kebutuhan lokal yang dalam jangka panjang menggunakan empat

187 Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan volume4, No 1, April 2016(63-76)Online: [Http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp](http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp) Penelitian Yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kulonprogo Oleh Dian Putra Kirana.

model, yaitu model duplikasi, modifikasi, substitusi dan madrasah ibtidaiyah di keempat model tersebut tidak tertuang pada dokumen kurikulum I Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah. Keempat model kurikulum tersebut akan diperjelas pada desain PPI, silabus dan RPP.¹⁸⁸

3. Penelitian berjudul *Rights, inclusion and citizenship: a good news story about learning in the early years* dan di tulis oleh Kate McAnelly & Michael Gaffney Kate McAnelly & Michael Gaffney (2019) *Rights, inclusion and citizenship*: memasukkan semua anak adalah sesuatu yang dicita-citakan oleh banyak latar pendidikan, namun hasil dari anak-anak yang menyadari hak mereka atas pendidikan inklusif tetap sulit dipahami karena terlalu banyak. Dalam artikel ini kami menyajikan narasi latar pendidikan anak usia dini yang inklusif. Penulis pertama melakukan studi etnografi tentang pengalaman anak cacat di taman kanak-kanak¹ di Aotearoa Selandia Baru sebagai bagian dari gelar Magister Pendidikannya. Ini dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan narasi partisipasi aktif, inklusi, dan kewarganegaraan yang dialami oleh anak itu dan keluarga mereka dalam komunitas itu. Narasi kolektif yang muncul menyoroti apa yang mungkin untuk inklusi bermakna anak-anak cacat, tidak hanya di Selandia Baru tetapi internasional, ketika masyarakat bertindak dengan maksud inklusif. Dalam artikel ini mereka mengidentifikasi tema identitas pelajar, mengadopsi pedagogi untuk partisipasi, membangun budaya kepemilikan dan kontribusi, dan terakhir, menggunakan lingkungan sebagai guru ketiga, yang muncul setelah menganalisis wawancara dengan beberapa peserta. Bersama-sama, tema-tema ini bergabung untuk menyediakan kerangka kerja evaluatif untuk meninjau kurikulum dan kinerja inklusif dalam pengaturan anak usia dini. memiliki aspirasi inti bahwa anak-anak akan mewujudkan citra diri mereka dan satu sama lain sebagai pembelajar dan komunikator yang kompeten dan percaya diri, sehat dalam pikiran, tubuh, dan jiwa aman dalam rasa memiliki dan memiliki dalam pengetahuan bahwa mereka

188 Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islamzumrotul Mukaffa, Taufik, dan M. Nuril Huda Pengembangan Model Madrasah Inklusif (Studi atas Kesiapan dan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Inklusif Mi Al-Hidayah Margorejo Surabaya)Vol. 12, No. 1, Februari 2017



memberikan kontribusi yang bernilai bagi masyarakat '(Kementerian Pendidikan 2017, 5). Ini adalah sebuah *disable children struggle aspiration* that many untuk mencapai dalam sistem pendidikan Selandia Baru meskipun *that it be a curriculum for all* niat inklusif Te Whāriki ini (Macartney, Purdue and MacArthur 2013). *Instead*, anak-anak cacat sering ditolak hak untuk mewujudkan gambar ini dari diri mereka sendiri dan untuk berlatih *identity work as competent, capable citizens with in their early childhood settings*. Further, lebih anak-anak cacat dan keluarga mereka dipinggirkan, dikucilkan, dan tidak diberdayakan, dan narasi ketika (tidak jika) segalanya menjadi buruk telah menjadi norma (Purdue 2009). Model sosial disabilitas yang menopang sejumlah besar beasiswa studi disabilitas modern dalam pendidikan (DSE), mengakui bahwa banyak dari pengalaman disabilitas adalah¹⁸⁹

4. Penelitian Exploring *the creation of a new initial teacher education (IyE) programme underpinned A, inclusion Meechin & eng K Tathleen* kuinlivan osemar, oleh Soophia Aotaw d, Jhuooa e Miauic, a r & lson, Ky (M 2 uossis 019) ini berupaya menyelidiki kendala dan peluang yang mendasari pengembangan program pendidikan guru awal (ITE) baru dengan tujuan merekonseptualisasi apa arti pendidikan inklusif dalam sistem pendidikan Aotearoa New Zealand (NZ).

Peluang untuk mengembangkan program ITE baru ini muncul dari permintaan Departemen Pendidikan [KLH] 2013. Permintaan untuk aplikasi penyediaan program pendidikan guru pascasarjana teladan (ITE). Welington: Penulis kepada penyedia ITE untuk mengembangkan program tingkat Master yang diarahkan untuk mengintervensi kesenjangan yang terus-menerus dalam hasil pendidikan bagi siswa yang diidentifikasi sebagai pelajar prioritas. Para praktisi pengajar the mengerjakan ruang dalam penciptaan dan implementasi program ITE baru yang berkomitmen untuk

¹⁸⁹International Journal of Inclusive Education ISSN: 1360-3116 (Print) 1464-5173 (Online)
Journal homepage: <https://www.tandfonline.com/loi/tied20> Rights, inclusion and citizenship: a good news story about learning in the early years Kate McAnelly & Michael Gaffney To cite this article: Kate McAnelly & Michael Gaffney (2019) Rights, inclusion and citizenship: a good news story about learning in the early years, International Journal of Inclusive Education, 23:10, 1081-1094, DOI: 10.1080/13603116.2019.1629123 To link to this article: <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1629123> Published online: 13 Jun 2019. Rights, inclusion and citizenship: a good news story about learning in the early years Kate McAnelly and Michael Gaffney College of Education, University of Otago, Dunedin, New Zealand

meningkatkan hasil belajar semua siswa di Aotearoa NZ, menarik bagi makalah ini.

Mereka menggunakan analisis wacana kritis (CDA) untuk menyelidiki cara inklusi dibangun dan dipraktikkan dalam pendekatan pendidikan masa lalu dan saat ini di Aotearoa NZ. Kami berpendapat bahwa analisis yang lebih luas tentang sifat yang berubah dan konteks sosial, budaya, sejarah, politik, dan kelembagaan yang kompleks di mana siswa berada diperlukan dalam reformasi dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar semua siswa dalam sistem pendidikan. Di anggap sebagai salah satu sistem dengan kinerja terbaik di dunia (KLH 2013, 3). Namun dalam permintaannya untuk aplikasi (RFA) ke penyedia ITE, KLH, serta data terbaru dari penilaian internasional seperti program penilaian siswa internasional (PISA), menyatakan bahwa tren dalam penampilan siswa tidak hanya menjadi statis, tetapi sedang menurun, bahkan di antara mereka yang sebelumnya berhasil dalam kelompok rata-rata di atas (Gilbert 2013; MoE 2013). Tren penurunan prestasi siswa ini juga telah dilaporkan di negara-negara OECD lain seperti Australia dan Amerika Serikat (lihat Barshay 2017; Hunjan dan Blumer 2016; Richmond 2016; Ryan 2013). Salah satu alasan mengapa Kementerian Pendidikan (MoE 2013) menawarkan kinerja akademik fundamental bagi siswa Aotearoa NZ dan perbedaan yang terus-menerus dalam© 2019 Informa UK Limited, berdagang sebagai Grup Taylor & Francis.

Keanekaragaman etnis dan warisan budaya multi budaya (3). KLH memproyeksikan bahwa lebih dari setengah populasi sekolah di Aotearoa NZ akan segera terdiri dari 'banyak warisan etnis dan non-Eropa (termasuk Maori dan Pasifika) dalam lima tahun ke depan (2013, 3). Pada 2010, EducationWorkforce Group Advisory Group (selanjutnya disebut sebagai 'Kelompok Penasihat') didirikan oleh Kementerian Pendidikan dalam upaya mereka untuk menanggapi masalah yang sedang berlangsung terkait dengan perbedaan dalam kinerja siswa dalam sistem pendidikan Aotearoa NZ (MoE 2010, 2013). Dalam rekomendasinya, Kelompok Penasihat (KLH 2010) menekankan perlunya tenaga kerja pengajar yang mencerminkan keragaman dalam populasi siswa. Namun demikian, Kelompok Penasihat, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup, mengharapkan penyedia ITE untuk menghasilkan pembuat teh yang muncul, lintas latar sosial-budaya,



yang akan dapat berinteraksi secara lancar dengan semua siswa mereka. Namun, seperti Cochran-Smith et al. (2016) menyatakan, upaya untuk membuat pendidikan inklusif tidak dapat dicapai hanya dengan meningkatkan akses semua siswa-terpinggirkan atau guru-guru yang baik. Studi ini menyelidiki investasi dalam ruang sosial yang diaktifkan oleh pemerintah¹⁹⁰

5. Penelitian *On the necessary co-existence of special and inclusive education* Lani Florian oleh Lani Florian (2019) *On the necessary co-existence of special and inclusive education*, banyak perbedaan antara pendidikan 'khusus' dan 'inklusif' telah dibuat dan terus diperdebatkan secara paksa, kedua konsep tersebut tetap sangat jelas dalam kebijakan dan praktik di banyak negara. Penelitian ini membahas sejarah yang saling terkait dari konsep-konsep ini. Ini mengeksplorasi bagaimana konseptualisasi dari mereka telah berubah sejak Salamanca dan mencerminkan apakah pendidikan inklusif telah, dapat atau harus menggantikan pendidikan khusus. Ini mempertimbangkan sejauh mana pendidikan 'khusus' dan 'inklusif' dipahami sebagai sama atau berbeda hari ini. Mengemukakan perbedaan yang jelas untuk dibuat antara pendidik khusus dapat bekerja dalam mendukung pendidikan inklusif dan tugas pendidikan inklusif yang mengatasi hambatan partisipasi yang dihadapi oleh anggota kelompok yang terpinggirkan.¹⁹¹
6. Penelitian kualitatif ini *Cultivating Familismo: belonging and inclusion in one Latina/o learning community*, F Sandra T. Konaales.

¹⁹⁰International Journal of Inclusive Education ISSN: 1360-3116 (Print) 1464-5173 (Online) Journal homepage: <https://www.tandfonline.com/loi/tied20> Exploring the creation of a new initial teacher education (ITE) programme underpinned by inclusion Meechin & Kathleen Quinlivan To cite this article: Soophia Aotaw d, Jhuooa e Miauic, a r & lson, Ky (M 2uossis 019) Bg flvulKiat Jho pKo, Jila lE, ao3 iaiJi,u Jo, phoK o(Mp, Jila 0:4fg vKltK, nno Ma(oKviaao(8y iapuMsilaw :aJoKa,Jila,u DIMKa,u lE :apuMsico f(Mp,Jilaw 10.)9w)9)/-)90)w 65: .)9)99)090))19)B)1 yo lin to this article: <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1625454> Published online: 10 7un 2019. JubSit mour yrtiale to this cournyl jrtiale Aievs: 10w Viey relyted yrtiales Viey CrossSyrk dyty

Exploring the creation of a new initial teacher education (ITE) programme underpinned by inclusion Leechin Heng, Kathleen Quinlivan and Rosemary du Plessis School of Educational Studies and Leadership, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand

¹⁹¹ International Journal of Inclusive Education ISSN: 1360-3116 (Print) 1464-5173 (Online) Journal homepage: <https://www.tandfonline.com/loi/tied20> On the necessary co-existence of special and inclusive education Lani Florian To cite this article: Lani Florian (2019) On the necessary co-existence of special and inclusive education, International Journal of Inclusive Education, 23:7-8, 691-704, DOI: 10.1080/13603116.2019.1622801 To link to this article: <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1622801> Published online: 29 May 2019. On the necessary co-existence of special and inclusive education Lani Florian Moray House School of Education, University of Edinburgh, Charteris Land, Edinburgh

Menempatkankerja di antara fungsi bersama dengan kerangka kerja budaya yang disebut 'familismo' untuk mempromosikan lingkungan inklusif untuk keberhasilan siswa Latin. Dengan menggunakan analisis induktif untuk memeriksa esai naratif dan cerita-cerita kecil, nilai-nilai dan tradisi yang terkait dengan familismo diungkapkan serta bagaimana mereka diberlakukan dalam komunitas belajar sarjana Latin/O di sebuah universitas riset perkotaan di Midwestern Amerika Serikat. Temuan menunjukkan bahwa penekanan budaya pada keluarga merupakan pujian penting untuk penelitian kepemilikan dan inklusi ketika bekerja dengan siswa Latina. Selain itu, ia menawarkan saran untuk penelitian masa depan. bagaimana suatu Pusat Studi Latina/O (pusat) di Negara Bagian Midwestern Amerika Serikat, memupuk secara budaya responsif terhadap ruang-ruang untuk populasi sarjana S1 Latina/O yang dominan. Salah satu praktik yang akan diperiksa adalah kerangka kerja budaya yang disebut 'familismo'. Sementara familismo telah diinvestigasi dalam kerangka keberhasilan siswa Latina/O pasca sekolah menengah (Marín dan Marín 1991; Saenz dan Ponjuan 2009; Suárez-Orozco dan Suárez-Orozco 1995),

Belum secara memadai dikaitkan dengan literatur tentang kepemilikan dan inklusi. Studi tentang risiko kepemilikan yang menghadap nuansa budaya penting seperti pentingnya keluarga; dan, tanpa ujian semacam ini, mungkin tidak cukup untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang benar-benar inklusif untuk siswa Latin. Dengan menggunakan cerita-cerita kecil, penelitian ini menunjukkan bagaimana inklusi bagi para siswa di center membutuhkan penanaman hubungan keluarga yang disengaja yang diperluas dari rumah ke kampus dan sebaliknya. Pentingnya mereproduksi hubungan yang responsif secara budaya ini adalah inti dari keluarga¹⁹²

¹⁹² International Journal of Inclusive Education ISSN: 1360-3116 (Print) 1464-5173 (Online)
Journal homepage: <https://www.tandfonline.com/loi/tied20> Yultivating Familismo: xelonging and inclusion in one Latina/o learning communitF Sandra T. Konales o cite this article: LaniFa lo r(n2a019)OtheCs yx0fpdafpnu va,p0p9,(s l10(nupnu ani pnJ0x9p(n pn (n1 Eafpna3(01aFnpnu J(„xnpf:7 8nf1Fnafp(na0 6(xFna0 (v 8nJ0x9pd1 4ixJafp(n7 D.8s htoht/t3hthhoOtheoht00 o lin to this article: <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1602362> Published online: 13 May 2019. View Crossmark data Cultivating familismo:belongingand inclusioninoneLatina/o learning community Sandra M. Gonzales Teacher Education Division, Wayne State University, Detroit, MI, USA



Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.1.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Isi Penelitian
Dian Putra Kirana Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan	Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Gadingan Wates Dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Pagerharjo Samigaluh	Tentang keefektifan manajemen pendidikan inklusi (MPI) dilihat dari standar pelayanan madrasah ibtidaiyah nimum, (2) perbedaan MPI di sekolah dasar negeri dengan MPI di sekolah dasar swasta.
Zumrotul Mukaffa, Taufik, dan M. Nuril Huda. Journal Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam	Pengembangan Model Madrasah Inklusi (Studi atas Kesiapan dan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Inklusi Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Margorejo Surabaya)	Menganalisis kesiapan madrasah menuju madrasah inklusi, dan mengembangkan salah satu produk yang dibutuhkan dalam pengembangan madrasah inklusi yaitu produk dokumen I kurikulum madrasah inklusi. Dalam prosesnya menggunakan model penelitian pengembangan. Madrasah inklusi yang dikembangkan di Madrasah Al-Hidayah berdasarkan analisis kebutuhan lokal yang dalam jangka panjang.
Kate McAnelly & Michael Gaffney Kate McAnelly & Michael Gaffney (2019) International Journal of Inclusive Education (Ruodledge)	Penelitian berjudul <i>Rights, inclusion and citizenship: a good news story about learning in the early years</i>	Memasukkan semua anak adalah sesuatu yang dicita-citakan oleh banyak latar pendidikan, namun hasil dari anak-anak yang menyadari hak mereka atas pendidikan inklusif tetap sulit dipahami karena terlalu banyak. Dalam artikel ini kami menyajikan narasi latar pendidikan anak usia dini yang

			inklusif. Penulis pertama melakukan studi etnografi tentang pengalaman anak cacat di taman kanak-kanak 1 di Aotearoa Selandia Baru sebagai bagian dari gelar Magister Pendidikannya. Ini dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan narasi partisipasi aktif, inklusi, dan kewarganegaraan yang dialami oleh anak itu dan keluarga mereka dalam komunitas itu. Narasi kolektif yang muncul menyoroti apa yang mungkin untuk inklusi bermakna anak-anak cacat, tidak hanya di Selandia Baru tetapi internasional.
4	Soophia Aotaw d, Jhuooae Miauc, a r & lson, Ky (Muossis 2019) International Journal of Inclusive Education (Ruodledge)	Ekploring the creation of a new initial teacher education (IyE) programme underpinned A, inclusion Meechin & engK Tathleen kuinlivan osemar,	Menyelidiki kendala dan peluang yang mendasari pengembangan program pendidikan guru awal (ITE) baru dengan tujuan merekonseptualisasi apa arti pendidikan inklusif dalam sistem pendidikan Aotearoa New Zealand (NZ). Peluang untuk mengembangkan program ITE baru ini muncul dari permintaan Departemen Pendidikan [KLH] 2013. Permintaan untuk Aplikasi Penyediaan Program Pendidikan Guru Pasca Sarjana Teladan (ITE). Welington: Penulis] kepada penyedia ITE untuk mengembangkan program tingkat Master yang diarahkan untuk



			mengintervensi kesenjangan yang terus-menerus dalam hasil pendidikan bagi siswa yang diidentifikasi sebagai 'pelajar prioritas'. Bagaimana para praktisi pengajar the mengerjakan ruang 'dalam penciptaan dan implementasi program ITE baru yang berkomitmen untuk meningkatkan hasil belajar semua siswa di Aotearoa NZ, menarik bagi makalah ini. Mereka menggunakan analisis wacana kritis (CDA) untuk menyelidiki cara inklusi dibangun
5	oleh Lani Florian (2019)International Journal of Inclusive Education (Ruodledge)	On the necessary co-existence of special and inclusive education	Banyak perbedaan antara pendidikan 'khusus' dan 'inklusif' telah dibuat dan terus diperdebatkan secara paksa, kedua konsep tersebut tetap sangat jelas dalam kebijakan dan praktik di banyak negara. Ini mengeksplorasi bagaimana konseptualisasi dari mereka telah berubah sejak Salamanca dan mencerminkan apakah pendidikan inklusif telah, dapat atau harus menggantikan pendidikan khusus.
6	Sandra T. Konaes International Journal of Inclusive Education (Ruodledge)	Yultivating Familismo: xelonging and inclusion in one Latina/o learning communif	Menempatkan kerja di antara fungsi bersama dengan kerangka kerja budaya yang disebut 'familismo' untuk mempromosikan lingkungan inklusif untuk keberhasilan siswa Latin. Dengan

			menggunakan analisis induktif untuk memeriksa esai naratif dan cerita-cerita kecil, nilai-nilai dan tradisi yang terkait dengan familismo diungkapkan serta bagaimana mereka diberlakukan dalam komunitas belajar sarjana Latin/o di sebuah universitas riset perkotaan di Midwestern (Amerika Serikat. Temuan menunjukkan bahwa penekanan budaya pada keluarga merupakan pujian penting untuk penelitian kepemilikan dan inklusi ketika bekerja dengan siswa Latina.
--	--	--	---

Sedangkan dalam penelitian ini memotret pelaksanaan pendidikan inklusi di dua tempat yang berbeda naungan dengan tujuan ingin mengetahui konsep dan desain yang di gunakan dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Sehingga peneliti akan menemukan sebuah formula yang tepat untuk pelaksanaan pendidikan inklusi dimanapun akan dilaksanakan. Maka dapat dilihat dalam tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Posisi Peneliti dari Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Judul	Fokus Penelitian	Orisinalitas
Yuni Masrifatin "Implementasi Pendidikan Inklusi Berbasis Kearifan Lokal (Studi Multikasus pada Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Pesantren Sabilul Muttaqin Mangiran Kediri dan	Konsep dan desain pendidikan inklusi proses integrasi pendidikan inklusi dan kearifan lokal serta Implementasi pendidikan inklusi berbasis kearifan lokal di Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Pesantren Sabilul Muttaqin Mangiran Pare	Penelitian lebih fokus pada proses penetapan desain serta keputusan untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis dalam pendidikan inklusi oleh kedua lembaga pendidikan yang berbeda naungan, yakni di



Sekolah Dasar Inklusi Pelangiku Jombang	Kediri dan Sekolah Dasar Inklusi Pelangiku di Jombang	bawah naungan Kemendikbud dan Kemenag.
---	---	--

K. Paradigma Penelitian

Pendidikan inklusi didasarkan pada empat landasan yaitu landasan filosofis, yuridis, pedagogis, dan empiris. *Pertama*, landasan filosofis. Landasan filosofis penerapan pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi mendasar, yaitu apa yang disebut Bhineka Tunggal Ika atau keragaman.¹⁹³ *Kedua*, landasan yuridis adalah Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994) Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ketiga, landasan pedagogis adalah Pasal 3 UU SiSekolah Dasariknas Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. *Keempat*, landasan empiris, yaitu hasil penelitian The National Academy of Sciences (Amerika Serikat) menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif.¹⁹⁴

Dari landasan inilah maka sebenarnya semua sekolah dan lembaga pendidikan harus melaksanakan pendidikan inklusi dengan konsep yang bagus.¹⁹⁵ Dalam penelitian ini di harapkan akan muncul sebuah formula yang tepat untuk manajemen pendidikan inklusi. Sehingga formula ini bisa

¹⁹³ Sofy Ariany Hasan, Muryantinah Mulyo Handayani, and M Psych, "Hubungan Antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Penyesuaian Diri Siswa Tunarungu di Sekolah Inklusi," *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* 3, No. 2 (2014): 128–35.

¹⁹⁴ Zaini Sudarto, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif," *Jurnal Pendidikan (Teori dan Praktik)* 1, No. 1 (2017): 97, <https://doi.org/10.26740/jp.v1n1.p97-106>.

¹⁹⁵ Wulansari, "Pengaruh Penandaan (Signifikasi), Penguasaan Sumber Daya (Dominasi), dan Legitimasi Pendidikan Inklusi terhadap Inklusivitas Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Surakarta dalam Perspektif Guru."

di gunakan dan dilaksanakan oleh banyak lembaga pendidikan meskipun dengan latar belakang yang beragam.

Sedangkan semua temuan dari dua situs di padukan untuk di cari data yang valid kemudian di kolaborasikan dengan teori yang ada, sehingga muncul sebuah formula atau regulasi yang tepat untuk pelaksanaan Pendidikan inklusi secara tepat mulai dari desain pendidikan inklusi, implementasi pendidikan inklusi maupun evaluasi pendidikan inklusi. Hal ini akan menjadikan semua sekolah mudah menyelenggarakan pendidikan inklusi dan tanpa ragu, sebab semua panduan sudah ada di dalamnya.

Selain akan mengatasi kurangnya sekolah penyelenggara inklusi juga akan membuat kesetaraan pendidikan pada semua peserta didik baik regular maupun berkebutuhan khusus. Kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi akan membuat banyak sekolah tertarik untuk ikut serta. Apalagi dengan di terapkannya zona pendidikan yang tentu saja akan menambah penerimaan semua jenis peserta didik tanpa kecuali. Termasuk peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak boleh di tolak dengan alasan apapun sebab secara zona masuk di sekolah terdekat.



Bagan 1.1 Paradigma Penelitian

